

ANALISIS KOTA SERANG

Dalam Angka

2024





KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Analisis Serang dalam Angka 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.



Buku ini disusun dalam rangka memberikan informasi yang objektif tentang data Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Inflasi Kota Serang pada tahun 2023.

Harapan kami semoga Buku Analisis Serang Dalam Angka 2024 ini dapat menjadi alat analisis dan evaluasi serta dapat menjadi bahan rujukan bagi semua pihak dalam memahami indikator pembangunan di Kota Serang saat ini. Selanjutnya, kami mengharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pengembangan perekonomian Kota Serang.

Serang, Agustus 2024

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Serang
Arif Rahman Hakim, S.Sos. M.Si



DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
BAB 2 PENDIDIKAN	8
BAB 3 KESEHATAN	18
BAB 4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	30
BAB 5 KETENAGAKERJAAN	40
BAB 6 KEMISKINAN	49
BAB 7 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	58
BAB 8 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	81
BAB 9 INFLASI	113
REFERENSI.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kependudukan Kota Serang.....	5
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2023	7
Tabel 2. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020-2023	13
Tabel 2. 2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020-2023	15
Tabel 2. 3 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid- Guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang Tahun 2023	16
Tabel 3. 1 Rasio Dokter,Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk di Kota Serang Tahun 2023	26
Tabel 3. 2 Prevalensi Stunting Kota Serang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2023	30
Tabel 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang Tahun 2020-2023	33
Tabel 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020 – 2023 ...	41
Tabel 5. 1 Struktur Ketenagakerjaan Penduduk Kota Serang Tahun 2023	44
Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023	45
Tabel 5. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020 – 2023 ...	47



Tabel 7. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kota Serang Tahun 2022–2023	64
Tabel 8. 1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 8. 2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	91
Tabel 8. 3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	96
Tabel 8. 4 Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah.	105
Tabel 8. 5 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah	107
Tabel 8. 6 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah	115
Tabel 8. 7 Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023	3
Gambar 1. 2 Penduduk Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	6
Gambar 2. 1 Grafik Angka Melek Huruf Kota Serang Tahun 2019- 2023.....	12
Gambar 2. 2 Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang 2023	18
Gambar 3. 1 Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Serang Tahun 2020-2023.....	21
Gambar 3. 2 Jumlah kematian Bayi Secara Absolut di Kota Serang Tahun 2020-2023.....	23
Gambar 4. 1 Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2020 – 2023	35
Gambar 4. 2 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2020 – 2023	36
Gambar 4. 3 Capaian Umur Harapan Hidup Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2020 – 2023	38
Gambar 4. 4 Pengeluaran Per Kapita Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2023	39
Gambar 5. 1 Upah Minimum Kabupaten/Kota (juta rupiah) di Provinsi Banten tahun 2023	50
Gambar 6. 1 Garis Kemiskinan Kota Serang Tahun 2019-2023.....	54
Gambar 6. 2 Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2019-2023.....	56
Gambar 6. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Serang Tahun 2019- 2023.....	59



Gambar 7. 1 Lima Penyumbang Terbesar PDRB Kota Serang Atas Dasar Berlaku Tahun 2023 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	66
Gambar 7. 2 Peta Rencana Pola Ruang RT/RW Kota Serang Tahun 2020-2040.....	82
Gambar 8. 1 Proporsi Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2023	90
Gambar 8. 2 Proporsi Kontribusi Jenis Belanja Daerah Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2023.....	93
Gambar 8. 3 Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Serang Tahun 2020-2023	102
Gambar 8. 4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2023	104
Gambar 8. 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2023	106
Gambar 8. 6 Rasio Belanja Operasi Kota Serang 2020-2023 ...	109
Gambar 8. 7 Rasio Belanja Modal Kota Serang Tahun 2020-2023	110
Gambar 8. 8 Rasio Tak Terduga Kota Serang Tahun 2020-2023	111
Gambar 8.9 Rasio Efektivitas Kota Serang Tahun 2020-2023.	114
Gambar 8. 10 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2023.....	116
Gambar 9. 1 Perkembangan Inflasi Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Bulan Januari–Desember 2023 .	119
Gambar 9. 2 Walikota Serang Syafrudin mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal oleh Mendagri Tito Karnavian.....	121



BAB 1 KEPENDUDUKAN



1.1 Gambaran Umum Demografi

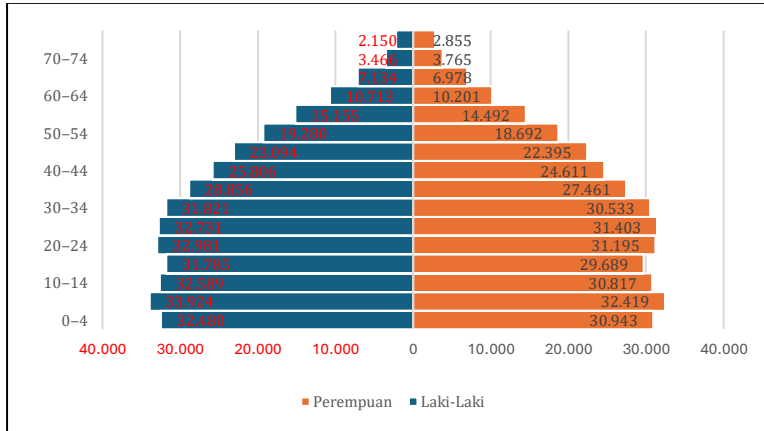
Struktur penduduk Kota Serang berdasarkan usia serta jenis kelamin dapat terlihat pada grafik piramida penduduk. Bentukan piramida penduduk Kota Serang sama halnya seperti tipe piramida milik daerah-daerah di negara berkembang pada umumnya yaitu piramida ekspansif.

Menunjukkan penduduk di Kota Serang dalam keadaan bertumbuh dan penduduk usia muda lebih besar. Berarti Hal ini tampak dari sebagian besar penduduk terdapat pada kelompok usia muda atau bagian bawah piramida melebar dan semakin meruncing pada bagian atas.

Komposisi penduduk Kota Serang pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 1.008.236 jiwa atau 71,27%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 329.616 jiwa atau 23,30% dan kelompok usia di atas 64 tahun sebanyak 76.767 jiwa atau 5,43%.

Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Serang memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif

tetap atau stabil. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: BPS Kota Serang

Gambar 1. 1
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2023

Bagian bawah melebar menunjukkan terjadinya kelahiran yang tinggi pada masa sebelum tahun 2023. Sedangkan bagian atas semakin mengecil menunjukkan tingkat kelahiran besar di waktu yang lalu.

Dasar piramida yang lebih besar dan sama dengan badan gemuk menunjukkan adanya perbaikan dari sisi kesehatan. Dimana terjadi kelahiran yang cukup besar pada beberapa waktu yang lalu, tetapi tingkat kematian bayi menurun sehingga jumlah bayi yang lahir dan tetap hidup mencapai usia dewasa lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Implikasinya, penduduk yang masuk pada usia kerja semakin besar (15-59 tahun).



1.2 Indikator Kependudukan Kota Serang

Hasil proyeksi penduduk dari Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa populasi Kota Serang pada tahun 2023 akan mencapai 723.794 orang, naik 1,60 persen dari 712.414 orang pada tahun 2022. Proporsi penduduk Kota Serang terhadap total penduduk Banten 5,88 persen. Penduduk Kota Serang posisinya sebagai kota dengan populasi terbanyak ketujuh di Provinsi Banten, atau kota dengan penduduk terkecil kedua di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon yang hanya 3,66 persen.

Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang menduduki peringkat ke-4 dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan laju pertumbuhan 2,59 persen pada tahun 2023, bahkan pertumbuhan penduduk ini berada di atas Provinsi Banten sebesar 1,16 persen dan Indonesia yang tumbuh hanya 1,13 persen.

Salah satu indikator kependudukan yang layak untuk dipertimbangkan, selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, adalah rasio jenis kelamin. Penduduk laki-laki berjumlah 369.567 orang, lebih banyak dari penduduk perempuan yang berjumlah 354.227 orang. Dengan demikian, rasio jenis kelaminnya sebesar 104 atau terdapat 104 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa fenomena migrasi terkait erat dengan peningkatan atau penurunan proporsi penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin. Dengan kata lain, di daerah tujuan migrasi yang membutuhkan banyak tenaga kerja laki-laki, seperti di daerah pertambangan, rasio jenis kelamin akan

meningkat dan tetap di atas 100, sementara di daerah yang ditinggalkan oleh para laki-laki untuk merantau, rasio jenis kelamin akan menurun dan bahkan cenderung berada di bawah 100.

Tabel 1. 1
Indikator Kependudukan Kota Serang

Keadaan Demografis	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Penduduk (orang)	712.414	723.794
- Laki-laki	363.965	369.567
- Perempuan	348.449	354.227
Rasio Jenis Kelamin	104,46	104,33
Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,63	2,59
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	2.710	2.773

Sumber: BPS Kota Serang

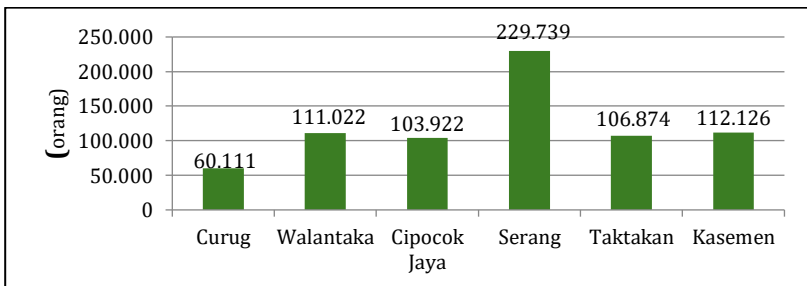
Dibandingkan dengan luas wilayahnya yang hanya sekitar 266,18 kilometer persegi, Kota Serang terasa makin sesak. Kondisi Ini terlihat dari tingkat kepadatan penduduknya yang naik hingga menjadi 2.773 orang per km². Selain itu, Kota Serang juga menjadi kota ketiga terpadat di Provinsi Banten, di bawah Kota Tangerang (10.937 orang per km²), Kota Tangerang Selatan (8.441 orang per km²), dan Kabupaten Tangerang (3.272 orang per km²).

Penduduk Kota Serang, secara geografis tidak terdistribusi dengan merata, karena lebih banyak yang mendiami wilayah Kota Serang Utara (Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen). Kondisi ini dapat terjadi karena wilayah Kota Serang Utara menjadi salah satu daerah pemukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran.

Sejarah Kota Serang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan pada masa Kesultanan Banten serta keberadaan jalan tol Merak-Tangerang menjadikan wilayah Kota Serang Utara berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah lainnya.

1.3 Kependudukan per Kecamatan

Komposisi penduduk Kota Serang pada tahun 2023 berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Serang yaitu 229.739 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Curug yaitu 60.111 jiwa.



Sumber: BPS Kota Serang

Gambar 1. 2
Penduduk Kota Serang Menurut Kecamatan Tahun 2023

Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2. Pertumbuhan penduduk, Kecamatan Serang sebagai wilayah terpadat justru memiliki angka laju pertumbuhan penduduk terendah dan di urutan keenam yaitu sebesar 0,89 persen. Tercatat pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Walantaka, yaitu 4,64 persen. Pada posisi kedua, adalah Kecamatan Taktakan dengan laju 3,70 persen.

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Serang Tahun 2023

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Curug	2,73	1.542,89	106
Walantaka	4,64	3.036,71	105
Cipocok Jaya	2,87	3.047,57	104
Serang	0,89	8.653,07	102
Taktakan	3,70	1.747,45	106
Kasemen	2,81	1.628,55	107
Kota Serang	2,59	2.719,19	104

Sumber: BPS Kota Serang



Variasi kondisi umum demografi di enam kecamatan Kota Serang, selain dilihat melalui jumlah serta laju pertumbuhan penduduk, juga dijelaskan melalui rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk. Rasio jenis kelamin tertinggi pada Kecamatan Kasemen sebesar 107. Selanjutnya Kecamatan Curug dan Kecamatan Taktakan sebesar 106 , sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Serang sebesar 102. Hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Serang didominasi oleh laki-laki.

Kecamatan Serang sebagai wilayah terpadat, memiliki nilai kepadatan lebih dari dua kali lipat kepadatan penduduk di Kecamatan Cipocok Jaya, yang merupakan daerah kedua terpadat di Kota Serang. Kepadatan penduduk di Kecamatan Serang sebesar 8.653 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Curug merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah sebesar 1.542 jiwa/km²



BAB II PENDIDIKAN



Pendidikan memegang peranan yang krusial dalam proses pembangunan, karena sektor Pendidikan menjadi landasan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu memberikan kontribusi berarti dalam membentuk Pembangunan. Situasi pendidikan di Kota Serang akan dijabarkan di bawah ini.

Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 yang telah ditetapkan adalah “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, Dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025”. Dimana Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten. Sebagaimana telah ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Infrastruktur”, kemudian disusun prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan Visi yang diamanatkan maka hal yang pertama dan menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Serang adalah menjadi Kota Pendidikan yang religius. Pendidikan bukan saja berkacamata pada suatu nilai akhir akan tetapi pendidikan haruslah mencerminkan pada karakter dan jati diri.

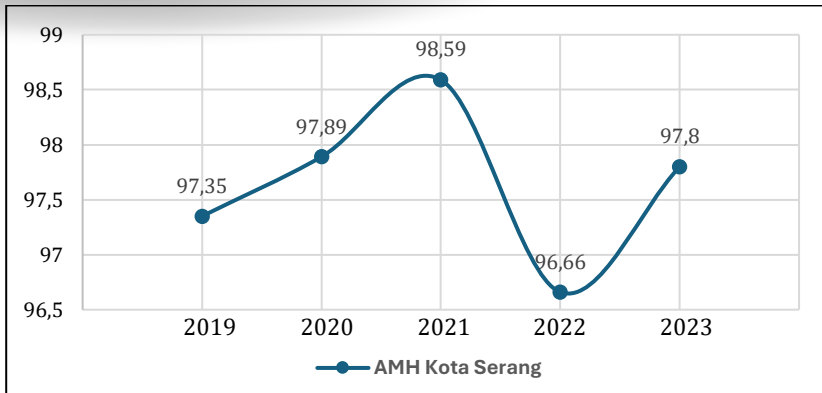
2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase atau proporsi populasi yang memiliki kemampuan membaca dan menulis pada tingkat tertentu. Angka ini mencerminkan tingkat literasi atau melek huruf dalam suatu populasi dan sering diukur sebagai persentase dari total populasi dalam kelompok usia tertentu.

Tingkat melek huruf dihitung dengan membandingkan jumlah individu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah total populasi dalam kelompok usia yang sama. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM.

Angka melek huruf di Kota selama lima tahun (2019 – 2023) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka melek huruf di Kota Serang mencapai 98,59 persen, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 97,93 persen. AMH meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 98,8 persen.

Berikut persentase angka melek huruf di Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 2. 1
Grafik Angka Melek Huruf Kota Serang Tahun 2019-2023

2.2 Angka Partisipasi Khusus (APK)

Salah satu indikator pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah

Angka Partisipasi Khusus (APK) mengukur partisipasi pendidikan pada suatu tingkat tertentu dalam kelompok usia tertentu. Ini mencakup semua siswa yang bersekolah pada tingkat tersebut, tanpa memperhatikan apakah mereka berada pada kelompok usia yang seharusnya berada di tingkat tersebut.

Berdasarkan hasil susenas 2023 didapatkan bahwa APK dan APM pada berbagai jenjang sekolah secara umum mengalami peningkatan, kecuali APM dan APK SMA/SMK/MA mengalami penurunan di sebabkan karena dampak Coivid-19.

Tabel 2. 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan (1)	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
SD/MI	110,08	111,15	110,85	107,67
SMP/MTs	88,03	92,09	93,29	98,35
SMA/SMK/MA	76,70	74,81	76,02	64,88

Sumber: BPS Kota Serang

APK Kota Serang untuk tingkat SD/MI pada tahun 2023 mengalami penurunan 3,18 persen dari tahun 2022 yang mencapai 110,85 persen menjadi 107,67 persen di tahun 2023. Nilai APK SD/MI lebih dari 100 persen karena populasi yang bersekolah pada jenjang SD mencakup anak di luar usia sekolah 7-12 tahun baik usia dini maupun usia telat sekolah.

Adapun APK untuk tingkat SMP/MTS di tahun 2023 mengalami peningkatan 5,06 persen dari tahun 2022 yang berada di angka 93,29 persen menjadi 98,35 persen. Demikian juga nilai APK SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar 11,14 persen yaitu tahun 2022 sebesar 76,02 persen menjadi 64,88 persen di tahun 2023

2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur partisipasi siswa pada tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang seharusnya berada di tingkat tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM Kota Serang untuk tingkat SD/MI dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, meskipun dapat dikatakan kurang optimal karena belum mencapai 100 persen. APM Kota Serang untuk SD/MI mengalami peningkatan 1,15 persen dari tahun 2020 yang berada di angka 97,17 persen menjadi 98,32 persen di tahun 2023.

Adapun APM untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Pada di 2022 berada di angka 80,21 persen meningkat menjadi 86,67 persen di tahun 2022, namun di tahun 2023 mengalami penurunan di angka 83,07 persen.

Sementara APM SMP/MTs mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2023. Pada tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan, namun di tahun 2023 menurun menjadi 83,07 persen.

Tabel 2. 2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Serang Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan (1)	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
SD/MI	97,17	97,86	97,83	98,32
SMP/MTs	80,21	83,57	86,67	83,07
SMA/SMK/MA	62,50	61,94	59,35	49,60

Sumber: BPS Kota Serang

Adapun APM tingkat SMA/SMK/MA merupakan jenjang pendidikan yang memiliki nilai APM yang rendah dan menunjukkan trend yang makin menurun dari tahun 2020 sebesar 62,50 persen menjadi 49,60 persen pada tahun 2023.

2.4 Rasio Murid dan Guru

Rasio murid-guru dapat digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar untuk meningkatkan mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin rendah.

Tabel 2. 3
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid- Guru di bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang Tahun
2023

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TK	228	6.190	719	12
SD	263	80.094	3.628	22
SMP	83	27.399	1.516	18
SMA	31	12.965	732	18
SMK	44	18.781	1.145	16

Sumber: BPS Kota Serang

Berdasarkan data di atas, terlihat rasio murid-guru di berbagai tingkatan pendidikan di Kota Serang pada tahun 2023 berkisar 12-22. Rasio murid dan guru tertinggi terdapat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 22, artinya 1 (satu) orang guru SD rata-rata memiliki beban mengajar sebanyak 22 siswa.

Adapun rasio murid guru terendah pada terdapat pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak sebesar 12, artinya artinya 1 (satu) orang guru TK rata-rata memiliki beban mengajar sebanyak 12 siswa.

2.5 Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2023

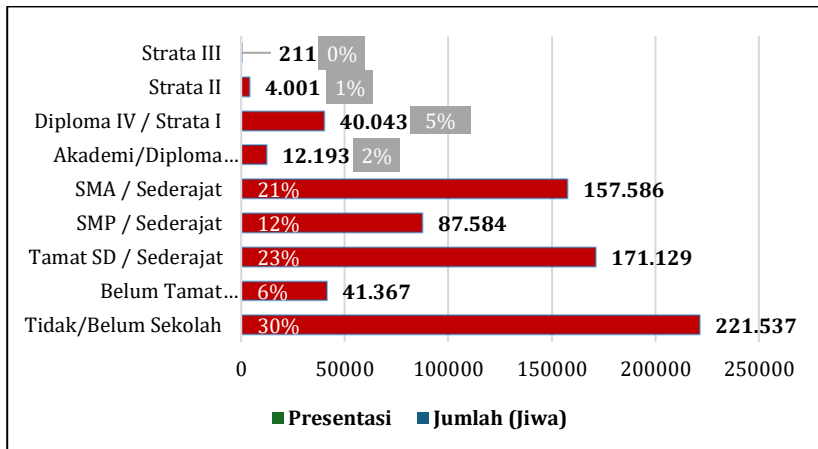
Analisis sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, dalam hal ini di Kota Serang. Dengan memahami sebaran ini, kita bisa melihat bagaimana pendidikan berperan dalam pembangunan sosial-ekonomi dan bagaimana intervensi kebijakan pendidikan dapat dioptimalkan.

Penduduk di Kota Serang dapat dibagi berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, seperti:

- **Tidak Tamat SD (Sekolah Dasar):** Penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tingkat ini sering kali mencerminkan masalah akses pendidikan atau drop-out.
- **Tamat SD:** Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Mereka umumnya memiliki kemampuan dasar baca, tulis, dan berhitung, namun mungkin kesulitan di dunia kerja yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.
- **Tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama):** Kelompok ini memiliki pendidikan menengah pertama dan biasanya lebih siap untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar.
- **Tamat SMA (Sekolah Menengah Atas):** Lulusan SMA cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya tamat SMP atau SD.

Mereka juga lebih mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi.

- **Tamat D1/D2/D3 (Diploma):** Penduduk dengan pendidikan diploma sering kali memiliki keterampilan khusus yang relevan untuk pekerjaan tertentu.
- **Tamat S1 (Sarjana):** Lulusan sarjana umumnya memiliki keahlian yang lebih tinggi dan lebih siap untuk posisi kerja yang membutuhkan pendidikan lanjutan.
- **Tamat S2 (Magister) dan S3 (Doktor):** Penduduk dengan gelar ini adalah tenaga ahli di bidangnya dan memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2024

Gambar 2. 2
Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan Di Kota Serang 2023

Berdasarkan gambar 2.2 di atas , sebaran penduduk di Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, di mana lebih dari 50 persen penduduk berada pada tingkat pendidikan dasar (belum sekolah dan tamatan SD).

Dengan 50 persen lebih penduduk Kota Serang berada pada tingkat pendidikan dasar (belum sekolah dan tamatan SD), ini menunjukkan bahwa separuh dari populasi di kota ini belum mencapai pendidikan menengah pertama (SMP). Distribusi ini mengindikasikan tantangan signifikan dalam hal akses dan kualitas pendidikan di tingkat dasar.

Sebagian besar pekerjaan di era modern memerlukan setidaknya pendidikan menengah atau keterampilan khusus yang biasanya tidak dimiliki oleh mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Akibatnya, penduduk yang hanya tamat SD atau belum sekolah cenderung menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Penduduk dengan pendidikan dasar atau kurang mungkin lebih rentan terhadap kemiskinan, karena mereka memiliki akses yang lebih terbatas terhadap peluang ekonomi.

Sebagian besar penduduk yang hanya memiliki pendidikan dasar bisa membatasi kemampuan Kota Serang untuk mengembangkan sektor ekonomi yang lebih maju. Ini juga dapat mempengaruhi daya saing kota dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi.

BAB III

KESEHATAN



Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat adalah indikator penting untuk menunjukkan kualitas pembangunan manusia suatu daerah. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin baik proses dan dinamika pembangunan ekonomi di daerah tersebut, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas penduduk.

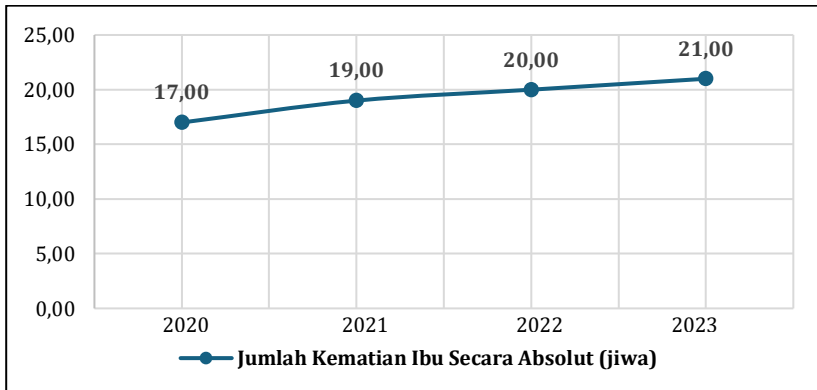
Pemerintah Kota Serang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat Sehat Mandiri. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih murah, meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga tentang pentingnya hidup sehat secara mandiri, dan menyediakan pembiayaan untuk program kesejahteraan.

Sasaran dari berbagai program bidang kesehatan di atas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, membuat masyarakat lebih mudah mengaksesnya, mengurangi gizi buruk dan kekurangan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan meningkatkan umur harapan hidup. Dalam program bidang kesehatan, pemerintah telah melakukan beberapa hal, seperti menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara lebih merata;

meningkatkan status rumah sakit daerah dan cakupan dan kualitas puskesmas, pustu, polindes, dan posyandu; dan meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

3.1 Angka Kematian Ibu (AKI):

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup selama kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan. Akses ke layanan kesehatan selama kehamilan dapat mengalami masalah karena tingginya AKI, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, keterlambatan dalam menerima perawatan medis yang diperlukan, atau masalah transportasi ke fasilitas kesehatan. Penurunan AKI menunjukkan bahwa layanan kesehatan ibu dan reproduksi lebih baik.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang

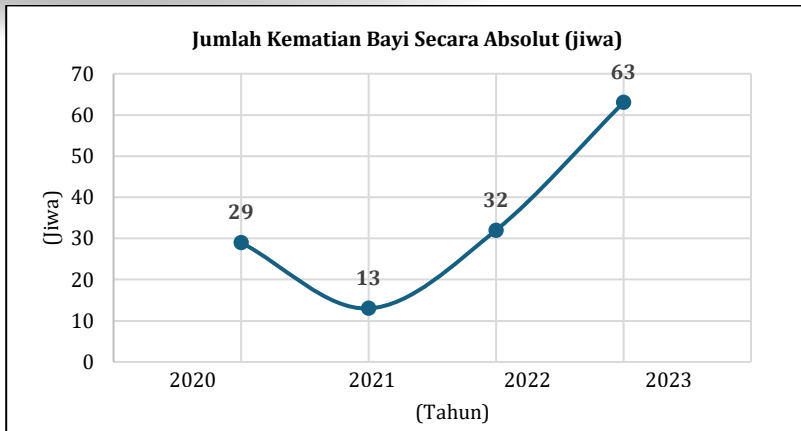
Gambar 3. 1
Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Serang
Tahun 2020-2023

Selama rentang waktu 2020–2023 AKI di Kota Serang terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi peningkatan kematian ibu mencapai 17 kasus pada tahun 2020 bertambah menjadi 21 kasus pada tahun 2023. Berdasarkan data pada Dinkes Kota Serang, penyebab kematian ibu diakibatkan karena penanganan yang terlambat. Hal itu dikarenakan, keluarga sebagai pengambil keputusan tidak bisa menentukan secara cepat, sehingga terlambat ketika merujuk pasien atau ibu yang hendak dan usai melahirkan.

Tingginya angka kematian ibu, selain terlambat dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, pendidikan yang minim pun menjadi salah satu faktor penyebab, karena kurangnya pemahaman itu juga menjadi sebab tingginya angka kematian ibu.

3.2 Angka Kematian Bayi (AKB):

Angka kematian bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Mereka juga dikenal sebagai kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi sangat menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan penggunaan layanan, khususnya yang berkaitan dengan perawatan prenatal. Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap kondisi kesehatan ibu, lingkungan, perilaku, dan status sosial orang tua, sehingga indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Serang

Gambar 3. 2
Jumlah kematian Bayi Secara Absolut
di Kota Serang Tahun 2020-2023

Angka kematian bayi menjadi indikator yang sensitif terhadap segala upaya intervensi pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan, dan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini karena penurunan angka kematian bayi akan menunjukkan tingkat kualitas optimal dalam aspek kesehatan yang mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Jumlah kematian tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebanyak 63 bayi. Faktor penyebab kematian pada bayi, rata-rata diakibatkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) yang menyebabkan sejumlah permasalahan pada bayi. Seperti gagal pernapasan atau disebut asfiksia yang membuat bayi sulit

bernapas. Hampir 63 kematian bayi disebabkan oleh asfiksia atau gagal bernapas. Karena, bayi lahir dengan BBLR.

3.3 Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Kesehatan terhadap penduduk

Rasio dokter terhadap penduduk adalah jumlah dokter yang tersedia per jumlah tertentu dari populasi, biasanya per 1.000 atau 10.000 penduduk. Rasio ini mencerminkan ketersediaan layanan medis dasar yang dapat diakses oleh masyarakat. Rasio ini penting untuk menilai seberapa baik suatu daerah dapat memberikan layanan kesehatan kepada warganya. Semakin tinggi rasio, semakin baik akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk adalah perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan (termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dll.) dan jumlah penduduk. Rasio ini memberikan gambaran tentang ketersediaan berbagai layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Rasio ini menunjukkan kemampuan sistem kesehatan untuk menangani kebutuhan kesehatan penduduk secara lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek perawatan kesehatan.

Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk adalah jumlah fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, klinik) per jumlah tertentu dari penduduk. Rasio ini mengukur akses fisik penduduk terhadap tempat di mana mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Rasio ini membantu mengukur aksesibilitas fisik masyarakat terhadap layanan kesehatan. Fasilitas yang cukup memadai secara geografis memungkinkan

masyarakat menerima perawatan lebih cepat dan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Jika rasio dokter, tenaga kesehatan, atau fasilitas kesehatan terhadap penduduk rendah, ini bisa menunjukkan kekurangan sumber daya kesehatan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan kesehatan, penurunan kualitas layanan, dan peningkatan beban kerja tenaga kesehatan. Misalnya, rasio dokter yang rendah mungkin berarti satu dokter harus melayani banyak pasien, yang bisa menyebabkan pelayanan yang lebih cepat tetapi kurang mendalam dan mungkin berisiko bagi pasien.

WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan standar minimum untuk rasio dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan terhadap penduduk guna memastikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Berikut adalah standar WHO untuk masing-masing rasio: Standar WHO: 1 dokter per 1.000 penduduk atau 10 dokter per 10.000 penduduk. Idealnya, ada satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk atau 10 dokter per 10.000 penduduk. Standar ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang cukup ke layanan medis dasar.

Adapun Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk menurut Standar WHO adalah 2,3 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) per 1.000 penduduk atau 23 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk. WHO merekomendasikan setidaknya ada 2,3 tenaga kesehatan (gabungan dokter, perawat, dan bidan) untuk setiap 1.000 penduduk guna mencapai tingkat cakupan layanan kesehatan dasar yang memadai.

Sementara Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk Standar WHO tidak ada angka universal yang ditetapkan secara langsung oleh WHO untuk fasilitas kesehatan, tetapi ada pedoman umum terkait aksesibilitas. WHO merekomendasikan bahwa fasilitas kesehatan dasar (seperti puskesmas) harus tersedia dalam jarak yang dapat dijangkau oleh masyarakat, umumnya dalam radius sekitar 5 kilometer atau dalam waktu tempuh sekitar 30 menit dari tempat tinggal. Fasilitas kesehatan harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh penduduk, terutama dalam situasi darurat.

Pemenuhan standar ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang cukup ke perawatan kesehatan, baik dalam hal jumlah tenaga medis yang tersedia maupun ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak. Memastikan bahwa rasio dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar WHO adalah langkah penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kesakitan dan kematian yang dapat dicegah.

Tabel 3. 1
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk di Kota Serang Tahun 2023

	Tahun 2023	Rasio
Jumlah Penduduk	723.794	
Jumlah Dokter	785	10,84
Jumlah Tenaga medis	884	12,21
Fasilitas Kesehatan	746	10,30
Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan (%)	30.22	



Sumber : BPS Kota Serang (data diolah) 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dokter terhadap penduduk yaitu $(785 / 723.794) \times 10.000 = 10,84$ dokter per 10.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa terdapat 11 dokter untuk setiap 10.000, artinya setiap individu memiliki akses yang cukup ke layanan medis dasar sesuai dengan standar WHO yaitu 10 dokter per 10.000 penduduk.

Adapun Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk yaitu $(884 / 723.794) \times 10.000 = 12,21$ tenaga kesehatan per 10.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa ada 12 tenaga kesehatan untuk setiap 10.000 penduduk. Ini bisa berarti bahwa layanan kesehatan masih dibawah standar WHO sebesar 23 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk.

Sementara Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk Rasio Fasilitas Kesehatan $= (746 / 723.794) \times 10.000 = 10,31$ fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa ada 11 fasilitas kesehatan untuk setiap 10.000 penduduk, yang mungkin mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia tetapi mungkin tidak merata atau tidak mencukupi, terutama jika fasilitas tersebut tersebar di area yang luas.

3.4 Penanganan Stunting

Menurut WHO (2015), *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang dari -2

standar deviasi (Sd) pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

Penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Banten merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta untuk mencapai tujuan Zero Stunting sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota hingga Tingkat Desa/Kelurahan agar melaksanakan Kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang menjadi gerakan bersama berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi yang tepat sasaran dan efektif kepada sasaran yang memiliki risiko Stunting. Melalui sasaran prioritas kepada calon pengantin, ibu hamil dan anak usia di bawah lima tahun diharapkan dapat menurunkan prevalensi Stunting di Provinsi Banten serta 8 (delapan) Kabupaten dan kota.

Dalam rangka pemenuhan target capaian Indikator Perpres 72/2021 dan RAN PASTI, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab TPPS Provinsi Banten telah seluruhnya

mencapai cakupan 100%. Yaitu, Tersedianya Kebijakan/Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam PPS; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk PPS; Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Kabupaten/Kota yang melaksanakan aksi konvergensi PPS; Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung PPS; Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam PPS; Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi PPS di Pemerintah Daerah Provinsi; Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting. Hanya 1 indikator yang belum memenuhi target 100% yaitu indikator Pilar 3.B.5. Persentase Kabupaten/Kota dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000. Dimana Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih memiliki angka ASFR (15-19) yang tinggi lebih dari 18.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2021-2023, Kota Serang memiliki angka prevalensi yang menunjukkan peningkatan dari 23,4 ke 23,8. Prevalensi stunting Kota Serang tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten yang mencapai 20,0.

Tabel 3. 2
Prevalensi Stunting Kota Serang dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun 2021 *	Tahun 2022 **	Tahun 2023 ***
Kabupaten Lebak	27,3%	26,2%	35,5%
Kabupaten Pandeglang	37,8%	29,4%	28,6%
Kabupaten Serang	27,2%	26,4%	23,9%
Kabupaten Tangerang	23,3%	21,1%	26,4%
Kota Cilegon	20,6%	19,1%	22,0%
Kota Serang	23,4%	23,8%	22,3%
Kota Tangerang	15,3%	11,8%	17,6%
Kota Tangerang Selatan	19,9%	9,0%	9,2%
Provinsi Banten	24,5%	20,0%	24,0%

Sumber Data:

*Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021

**Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022

***Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Berdasarkan data prevalensi Stunting pada tabel ini, dapat ditemukan beberapa hal penting: Secara umum, prevalensi Stunting di Provinsi Banten menurun dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20,0% pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 24,0% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya penurunan Stunting di provinsi ini masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif. Kabupaten/kota dengan prevalensi Stunting tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Lebak, dengan angka 35,5%. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Kabupaten Pandeglang juga masih memiliki prevalensi Stunting yang tinggi, yaitu 28,6% pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kota Tangerang Selatan mencatatkan prevalensi Stunting terendah, yaitu hanya 9,2% pada tahun 2023. Ini menunjukkan keberhasilan upaya upaya penanggulangan Stunting di wilayah tersebut.



Beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, justru mengalami peningkatan prevalensi Stunting dari tahun 2022 ke 2023, mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih efektif di daerah-daerah tersebut. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan Stunting yang lebih holistik dan terukur. Pendekatan berbasis data yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara konsisten, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi Stunting yang masih tinggi.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM Kota Serang dalam empat tahun terakhir dari tahun 2020–2023 terus mengalami peningkatan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang salah satunya akan terepresentasikan melalui capaian IPM Kota Serang Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2023 adalah 76.43 poin.

Tabel 4. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang
Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Pendidikan (Tahun)				
Harapan Lama Sekolah	12,78	12,79	12,81	12,82
Rata-rata Lama Sekolah	8,76	8,89	8,90	8,91
Kesehatan (Tahun)				
Umur Harapan Hidup	67,83	68,12	68,54	68,98
Standar Hidup Layak (Ribu rupiah/Orang /Tahun)				
Pengeluaran per Kapita	13,212	13,281	13,709	14,088
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,25	75,53	76,01	76,43

Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Perhitungan IPM mengalami perubahan pada komponen usia harapan hidup (UHH) karena menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Hal ini menyebabkan capaian IPM Kota Serang dari tahun 2020 hingga 2023 meningkat dari perhitungan sebelumnya yang tidak menggunakan Long Form SP2020.

Capaian IPM Kota Serang Tahun 2023 sebesar 76,43 poin, melebihi target yang ditetapkan (73,09), Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,42 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 76,01 poin dan masuk pada klasifikasi “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Banten dan Indonesia ditahun yang sama, yaitu sebesar 75,77 poin dan 74,39 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Serang dapat meningkatkan

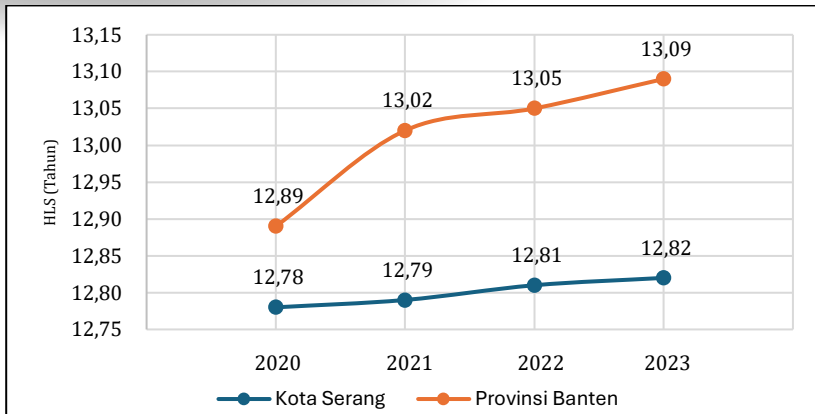


akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

4.1 Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah Kota Serang mencapai 12,82 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2022 yang sebesar 12,81. Ini berarti, pada tahun 2023 penduduk usia 7 tahun di Kota Serang diharapkan dapat bersekolah selama 12,81 tahun, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, harapan lama sekolah penduduk Kota Serang di tahun 2023 berada di bawah harapan lama sekolah penduduk Provinsi Banten. Terdapat selisih 0,21 tahun untuk komponen harapan lama sekolah. Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah Provinsi Banten adalah 13,09 tahun.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

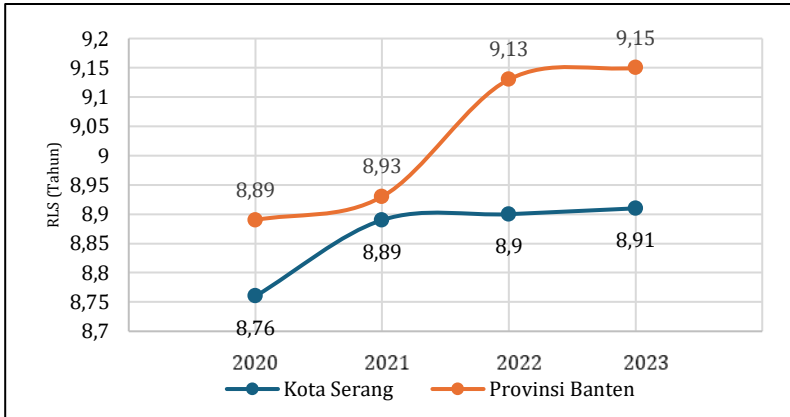
Gambar 4. 1
Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah Kota Serang berada di urutan ke-7 di Provinsi Banten. Tertinggi pertama yaitu Kota Tangerang Selatan dengan harapan lama sekolah sebesar 14,68 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah terendah yaitu Kabupaten Lebak sebesar 12,10 tahun.

4.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Serang pada tahun 2023 telah mencapai 8,91 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa

kualitas pendidikan penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 4. 2
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah Kota Serang berada di urutan ke-5 di Provinsi Banten. Tertinggi pertama yaitu Kota Tangerang Selatan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,85 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah yaitu Kabupaten Lebak sebesar 6,60 tahun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Serang di tahun 2023 berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Banten. Terdapat selisih 0,23

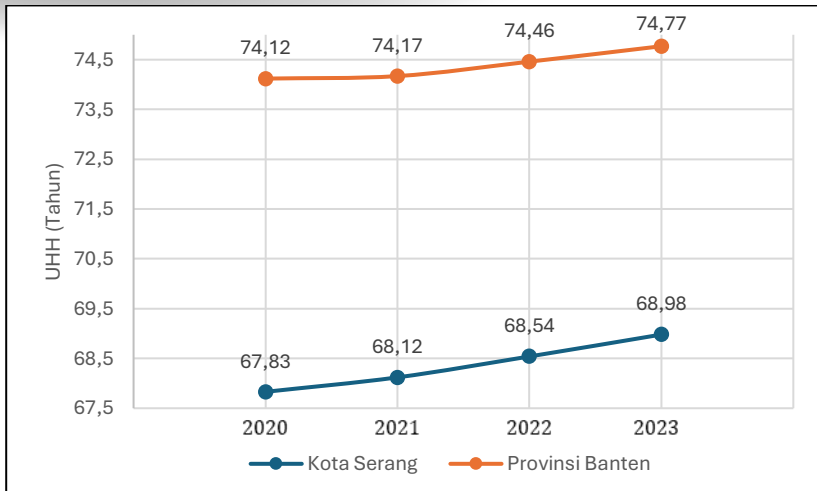
tahun untuk rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah Provinsi Banten adalah 9,15 tahun.

4.3 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator kesehatan yang menggambarkan estimasi tahunan rata-rata yang diharapkan seseorang atau kelompok penduduk akan hidup pada saat lahir. Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakatnya.

Umur Harapan Hidup Kota Serang pada periode 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 UHH di Kota Serang sebesar 67,83 tahun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 UHH Kota Serang mencapai nilai 68,98 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Serang memiliki harapan hidup hingga di umur 68 tahun.

Umur Harapan Hidup Kota Serang lebih rendah dibandingkan dengan UHH di Provinsi Banten. UHH Provinsi Banten di tahun 2023 adalah 70,39, lebih tinggi sekitar 1 (satu) tahun dari UHH di Kota Serang. Perkembangan umur harapan hidup di Kota Serang selama kurun waktu lima tahun (2020–2023) dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 4. 3
Capaian Umur Harapan Hidup Kota Serang dan Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2023

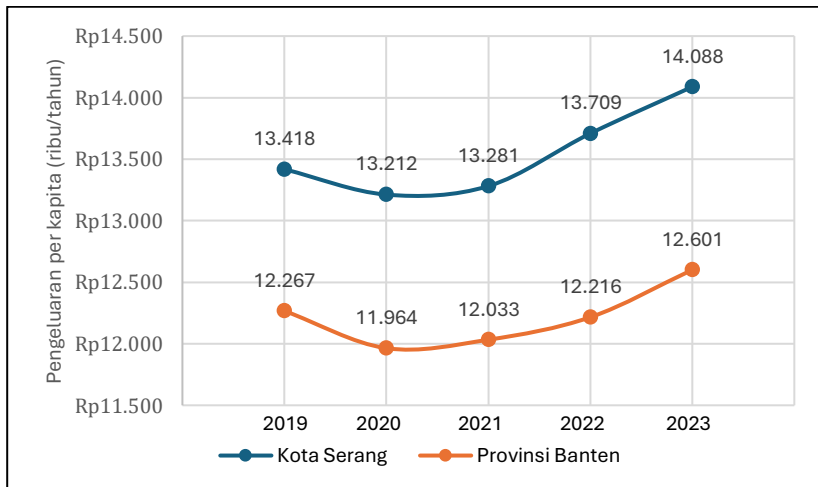
Umur Harapan Hidup Kota Serang pada tahun 2023, mencapai 68,98 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Serang yang lahir pada tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 68 tahun. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, Kota Serang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,15 tahun.

4.4 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita, sebagai salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menawarkan

perspektif penting tentang kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Indikator ini mencerminkan rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi, memberikan gambaran mengenai daya beli dan konsumsi perorangan.

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator pembentuk IPM, yang mengalami kenaikan yang cukup besar. Pengeluaran per kapita Kota Serang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian kembali menunjukkan peningkatan seperti kecenderungan sebelum pandemi COVID-19. Peningkatan ini menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 4. 4
Pengeluaran Per Kapita Kota Serang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2023

Pada tahun 2023, pasca pandemi COVID-19, pengeluaran per kapita Kota Serang mengalami peningkatan sejak tahun 2021 dan mencapai Rp14.088.000/kapita/tahun di tahun 2023. Pengeluaran per kapita tahun 2022 sudah lebih besar dibanding tahun 2019 (sebelum pandemi). Kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan secara rata-rata. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Serang. Ini artinya kemampuan masyarakat Kota Serang dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023.

4.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang selama empat tahun terakhir bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten selalu berada di posisi empat besar. Data BPS 2023 mencatat bahwa IPM Kota Serang mencapai 76,43 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 76,01. Adapun IPM Tertinggi tahun 2023 yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 83,57 poin. Sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Lebak sebesar 67,68 poin.

Kota Tangerang Selatan mendapatkan nilai tertinggi untuk setiap dimensi atau komponen pembentuk IPM, seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Melihat capaian IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, terjadi disparitas antara IPM kabupaten dan kota yang cenderung masih tinggi 15,89 point dimana IPM tertinggi yaitu Tangerang Selatan sebesar 83,57 point dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Lebak sebesar 67,68 point. Adanya disparitas

harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Banten untuk mengurangi gap antar kabupaten dan kota.

Tabel 4. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Pandeglang	68,86	69,02	69,70	70,28
2. Lebak	66,39	66,50	67,19	67,68
3. Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56
4. Serang	70,93	71,05	71,99	72,63
Kota				
1. Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98
2. Cilegon	76,80	77,11	77,68	78,24
3. Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43
4. Tangerang Selatan	82,73	82,98	83,28	83,57
Provinsi Banten	74,41	74,68	75,25	75,77
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39

Catatan/Note: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2023 dihitung menggunakan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) hasil Long Form SP2020 (LF SP2020).

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia.

BAB V

KETENAGAKERJAAN



Salah satu komponen utama kesejahteraan masyarakat adalah ketenagakerjaan. Sayangnya, ada banyak masalah ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan, diantisipasi, dan diselesaikan oleh pemerintah. Ini termasuk tingginya tingkat pengangguran, sedikitnya penciptaan lapangan kerja, dan rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pengembangan sumber daya manusia, yang memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

Sebaliknya, ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting untuk pembuatan kebijakan pemerintah, pembangunan nasional, dan pengobatan masalah ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

BPS menggunakan konsep ketenagakerjaan dari The Labor Force Concept, yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi populasi menjadi dua kelompok: usia kerja (orang berusia 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Kelompok pertama dibedakan berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian: bekerja dan mencari pekerjaan (pengangguran). Bukan angkatan kerja mencakup hal-hal seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

5.1 Struktur Ketenagakerjaan Kota Serang

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yang tergolong sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sangat penting dalam kegiatan perekonomian, karena indikator ini bisa menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja sehingga mempunyai arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan Kota Serang.

Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Serang mencapai 66,33 persen berarti ada sekitar 68 orang dari 100 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Adapun sisanya,

bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya

Tabel 5. 1
Struktur Ketenagakerjaan Penduduk Kota
Serang Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)
Angkatan Kerja	363.850
Bekerja	336.725
Pengangguran Terbuka	27.125
Bukan Angkatan Kerja	167.810
Sekolah	43.289
Mengurus Rumah Tangga	100.567
Lainnya	23.954
Jumlah	531.660
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,33

Sumber: Kota Serang dalam Angka, 2022

5.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menggambarkan hubungan antara jumlah orang yang tidak bekerja dengan jumlah orang yang sedang bekerja atau yang dapat bekerja. Jumlah orang tidak bekerja biasanya mencakup anak-anak (di bawah usia produktif) dan orang lanjut usia (di atas usia produktif). Jumlah orang yang bekerja melibatkan mereka yang berada dalam usia produktif, yang secara umum dianggap

antara 15 dan 64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan muda menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk usia muda (0-14 tahun) yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 Kota Serang memiliki 501.728 jiwa penduduk usia produktif dan 222.066 jiwa usia non-produktif, baik itu penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun penduduk usia tidak lagi produktif atau lansia. Dari jumlah kependudukan tersebut, rasio ketergantungan Kota Serang yaitu sebanyak 44,26%. Artinya, setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 44 penduduk yang tidak produktif.

Tabel 5. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)
0 – 14 tahun	193.437
15 – 64 tahun	501.728
>65 tahun	28.629
Angka ketergantungan	44,26%

Sumber: BPS Kota Serang, 2023

Dengan banyaknya beban ketergantungan di bawah 50, Kota Serang mungkin telah menerima bonus demografis. Bonus demografi telah diperoleh sejak tahun 2010, bahkan berdasarkan

hasil proyeksi penduduk. Selain itu, bonus demografi akan terus dinikmati hingga 2035 (BPS, 2013a).

Bonus demografi adalah fenomena yang menunjukkan struktur penduduk yang sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi penduduk usia muda dan usia lanjut telah menurun. Jika beban ketergantungan terus berkurang hingga di bawah 50, bonus demografi mulai digunakan.

Walaupun Kota Serang telah menerima bonus demografi sejak lama, itu belum tentu menguntungkan. Sumber daya manusia Kota Serang harus terus ditingkatkan untuk menikmatinya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Serang, peningkatan pelayanan kesehatan, kuantitas dan kualitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dapat dimulai.

Jika kualitas sumber daya manusia tidak selaras dengan standar kualifikasi yang diperlukan, jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak terkendali ketika bonus demografi tiba. Akibatnya, sumber pendapatan masyarakat menurun, meningkatkan kemiskinan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu indikator signifikan dalam pemantauan kondisi ketenagakerjaan, yang mengukur proporsi dari angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya. Dalam

konteks ini, angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja dan mereka yang secara aktif terlibat dalam pencarian pekerjaan.

TPT menjadi cermin dari dinamika pasar tenaga kerja, mencerminkan tingkat ketersediaan lapangan kerja dan kesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar. Pemahaman mendalam akan TPT memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang efektif.

Tabel 5.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020 – 2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Pandeglang	9,15	7,7	9,24	9,05
2. Lebak	9,63	7,86	8,55	7,57
3. Tangerang	13,06	9,06	7,88	6,94
4. Serang	12,22	10,58	10,61	9,94
Kota				
1. Tangerang	8,63	9,07	7,16	6,76
2. Cilegon	12,69	10,13	8,1	7,25
3. Kota Serang	9,26	9,41	8,17	7,45
4. Tangerang Selatan	8,48	8,6	6,59	5,81
Provinsi Banten	10,64	8,98	8,09	7,52

Sumber: BPS Provinsi Banten

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 terjadi peningkatan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Serang mencapai 9,41 persen. Tingginya TPT pada tahun tersebut memberikan gambaran kondisi dan tantangan untuk menciptakan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, TPT pada tahun 2022 dan 2023 mulai menurun sebesar yaitu sebesar 8,17 persen, turun sebesar 8,17 persen dan 7,25 persen.

TPT pada 2 tahun terakhir terbesar terjadi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2022 yang masing-masing sebesar 10,61 persen dan 9,24 persen selanjutnya pada tahun 2023 sebesar 9,94 persen dan 9,05 persen. Sementara yang terendah dan berada di bawah TPT Banten ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

5.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Tingginya tingkat kesejahteraan pekerja, antara lain dapat diketahui dari besarnya upah yang diterima. Upah minimum regional (UMR) memiliki perbedaan dengan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMK merujuk pada upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota, yang diajukan oleh bupati/wali kota dan ditetapkan oleh gubernur. Sebenarnya, istilah upah minimum regional (UMR) sendiri telah diganti menjadi upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Namun, definisinya tetap sama dengan UMR. Oleh karena itu,

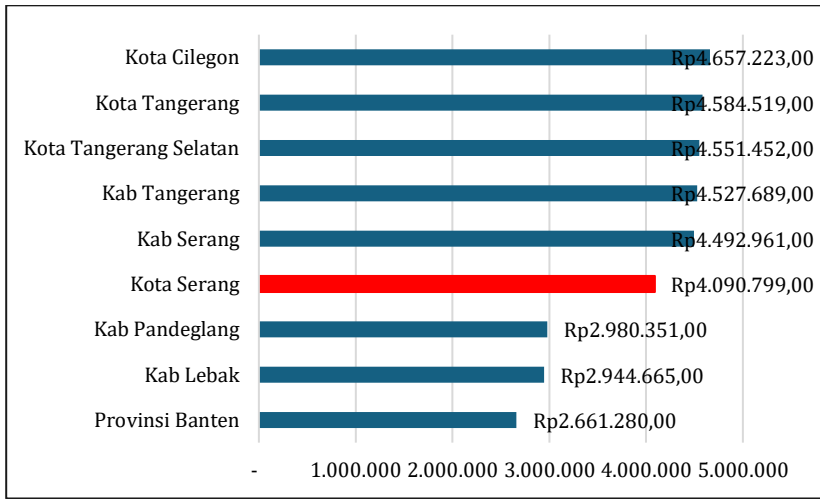


masyarakat awam masih umumnya menyebut upah minimum di satu provinsi sebagai UMR.

UMK 2023 di seluruh kabupaten/kota di Banten telah ditetapkan pada 7 Desember 2022. Semua UMK 2023 di Banten naik dibandingkan tahun 2022. besaran UMK Banten 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten bernomor 561/Kep.318-Huk/2022. Dari surat keputusan tersebut diketahui kenaikan UMK berbeda-beda lantaran faktor inflasi, alfa, serta tingkat pengangguran terbuka yang berbeda di masing-masing daerah.

Kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Cilegon sebesar 7,3% dari Rp4,34 juta pada 2022 menjadi Rp4,66 juta pada 2023. Kemudian kenaikan terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 6,17% dari Rp2,77 juta menjadi Rp2,94 juta. Sebagai catatan, besaran UMP dan UMK Banten 2023 ini akan berlaku mulai 1 Januari 2023.

Pekerja di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023, masih menerima upah minimum terendah di Banten, yaitu masing-masing hanya 2,94 juta rupiah dan 2,98 juta rupiah per bulan. Adapun yang tertinggi diterima oleh mereka yang bekerja di Kota Cilegon, dengan besaran upah mencapai 4,66 juta rupiah sebulan.



Sumber: BPS Provinsi Banten

Gambar 5. 1
Upah Minimum Kabupaten/Kota (juta rupiah) di Provinsi Banten
tahun 2023

Tinggi atau rendahnya upah yang diterima oleh para pekerja ini, lebih terkait dengan jenis pekerjaan yang ada di wilayah masing-masing. Pekerja di Kota Cilegon menerima upah tertinggi, karena wilayahnya menjadi daerah sentra industri Baja dan Kimia yang padat modal dan berteknologi tinggi. Sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi penerima upah terendah, karena jenis pekerjaannya memang lebih banyak berkaitan dengan sektor pertanian yang tenaga kerjanya berlebih.



BAB VI

KEMISKINAN

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik di banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Akibatnya, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" kembali menempatkan kemiskinan sebagai tujuan utama, setelah sebelumnya menjadi tujuan utama dalam "*Millennium Development Goals (MDGs)*." SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030.

Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, sehingga selalu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Pemerintah menargetkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6% hingga 7% pada 2024 dari angka baseline 9,45% pada 2019.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS RI, 2023). World Bank (2023) menentukan batas penghasilan sebesar 1 USD per kapita per hari untuk mengkategorikan kemiskinan. Lebih lengkap, Todaro dan Smith (2011) memandang kemiskinan sebagai suatu konseptual yang terdiri atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok berupa makanan, air, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara kemiskinan relatif merujuk pada kondisi yang disebabkan karena pengaruh suatu kebijakan yang belum mampu menjangkau masyarakat secara merata yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Determinan kemiskinan cukup beragam, namun secara garis besar dikategorikan menjadi dua penyebab utama (Asmara & Suci, 2014). Pertama, kemiskinan kultural yang disebabkan faktor adat dan budaya wilayah yang mengikat penduduknya dan melekat dengan indikator kemiskinan. Dan kedua, kemiskinan struktural yang disebabkan kondisi struktur dan tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.

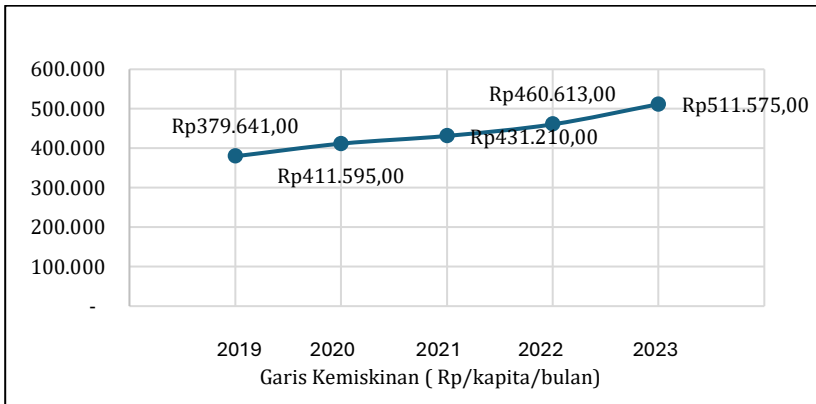
Peningkatan angka kemiskinan berpotensi menimbulkan masalah lainnya seperti ketimpangan dan kecemburuan sosial, penurunan kualitas sumber daya manusi, serta peningkatan tindakan kriminal (Utami et al., 2022). Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif

6.1 Garis Kemiskinan

Ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, baik makanan maupun non-makanan, disebut kemiskinan. Garis kemiskinan, yang dihitung dari data pengeluaran, digunakan untuk membedakan orang miskin dari orang kaya. Dalam hal pengeluaran per kapita bulanan rata-rata di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskinnya.

Dalam lima tahun terakhir, garis kemiskinan di Kota Serang terus meningkat. Garis kemiskinan mencapai Rp 379 ribu per kapita pada 2019. Kemudian meningkat secara bertahap hingga menjadi Rp 412 ribu per kapita pada 2020, Rp 431 ribu pada 2021, Rp 461 ribu pada 2022, dan Rp 512 ribu pada 2023 .

Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh peningkatan biaya hidup yang disebabkan oleh peningkatan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, garis kemiskinan juga meningkat sebagai akibat dari perubahan gaya hidup atau pola konsumsi rumah tangga.



Sumber: BPS Survey Sosial Ekonomi Nasional Maret

Gambar 6. 1
Garis Kemiskinan Kota Serang
Tahun 2019-2023

Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan, dihitung berdasarkan 52 komoditi kebutuhan dasar makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Adapun garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai pengeluaran atau kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang dihitung berdasarkan 36 komoditi kebutuhan dasar bukan makanan.

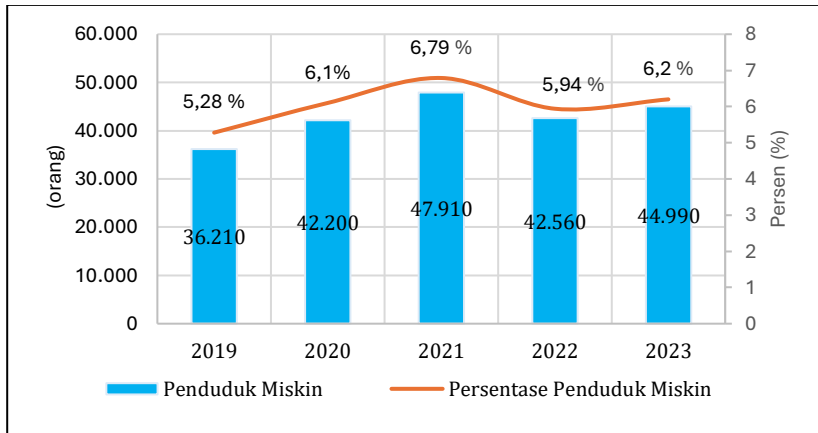
6.2 Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak terkecuali di Kota Serang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, tingkat kemiskinan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Serang mengalami peningkatan pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 menjadi 42.200 jiwa (6,10 %). Di tahun 2021 masih terjadi peningkatan sebagai akibat dari pandemi dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga angka kemiskinan mencapai 47.910 jiwa (6,79 %).

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Serang menurun sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi 42.560 jiwa (5,94 %) persen. Meskipun belum dapat kembali ke kondisi sebelum pandemi, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin dalam satu tahun cukup signifikan, yaitu sejumlah 5,35 ribu jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa

perekonomian di Kota Serang mulai bangkit dari dampak keterpurukan pandemi COVID-19.



Sumber: BPS Survey Sosial Ekonomi Nasional Maret

Gambar 6. 2
Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Kota Serang
Tahun 2019-2023

Akan tetapi, angka kemiskinan Kota Serang di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 44.990 jiwa (6,20 %). Peningkatan angka kemiskinan di Kota Serang karena adanya penduduk rentan miskin menjadi penduduk miskin. Faktor penyebabnya karena minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan. Sehingga pada tahun 2023, angka penduduk miskin di Kota Serang bertambah.

Kota Serang menempati posisi keempat di Provinsi Banten sebagai Kabupaten/Kota dengan penduduk miskin yang cukup tinggi. Akan tetapi, angka kemiskinan Kota Serang masih

lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata kemiskinan secara nasional sebesar 9,36 %. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Serang apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Nasional, tidak menjadikan persoalan ini dihapuskan dari prioritas utama Pembangunan daerah. Melainkan, pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan Nasional serta melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat Kabupaten atau Kota.

Keterkaitannya dengan hal di atas, Pemerintah Daerah Kota Serang berkewajiban untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Serang telah membuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari penanggulangan kemiskinan di Kota Serang untuk penghormatan, perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berbagai langkah strategis Pemerintah Daerah Kota Serang untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf

kehidupan yang layak serta bermartabat demi tercapainya Kesejahteraan Sosial Khusus untuk Kota Serang.

Program penanganan kemiskinan dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dirancang untuk meminimalisir perkembangan masalah ini yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk program yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, yaitu: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM).

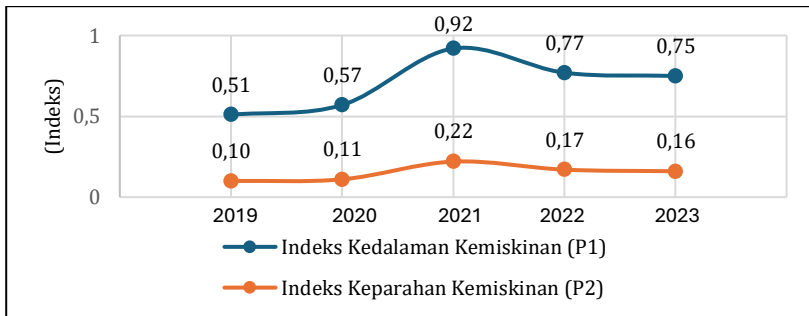
6.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Pemetaan kemiskinan tidak hanya terbatas pada persentase penduduk miskin saja. Melainkan pemerintah perlu mengetahui lebih jauh mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Naik

dan turunnya angka kemiskinan di Kota Serang juga diikuti oleh naik dan turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)-nya.

Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota Serang tahun 2019 sebesar 0,51. Pada tahun 2020-2021 meningkat terus menjadi 0,67 dan 0,92, artinya rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kota Serang dari tahun 2019-2021 semakin menjauhi garis kemiskinan. Namun pada tahun 2022-2023 mulai mengalami penurunan angka indeks menjadi 0,77 dan 0,75 yang artinya rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kota Serang semakin mendekati garis kemiskinan.



Sumber: BPS Survey Sosial Ekonomi Nasional Maret

Gambar 6. 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan Kota Serang Tahun 2019-2023

Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga pada tahun 2019-2021 semakin membesar dari 0,10 naik menjadi 0,11 dan meningkat lagi menjadi 0,22. Artinya, pengeluaran penduduk miskin secara rata-rata meningkat hingga semakin menjauhi garis

kemiskinan. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin semakin melebar. Sebaliknya, mulai tahun 2022-2023 indeks keparahan kemiskinan Kota Serang mulai menurun menjadi 0,17 dan 0,16.

Pengentasan kemiskinan di Kota Serang memang belum maksimal. Hal ini karena program pengentasannya masih bersifat parsial dan cenderung urban sentris. Akibatnya, angka kemiskinan dan persentase penduduk miskin masih tinggi. Penanggulangan kemiskinan perlu dipahami sebagai upaya komprehensif seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada pekerja yang terdampak, penduduk miskin dan rentan miskin.

Koordinasi dan sinkronisasi program diperlukan lintas kementerian, lembaga pada tingkat pusat, lintas organisasi perangkat daerah di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi dan koordinasi program juga dilaksanakan secara vertikal, pusat, daerah, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, dan tingkat RW-RT.



BAB VII

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah



seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

7.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Perekonomian Kota Serang yang diukur berdasarkan nilai nominal PDRB atas harga konstan 2010 (ADHK), PDRB Kota Serang meningkat dari Rp 24, 49 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 25,65 triliun pada tahun 2023. Artinya, PDRB Kota Serang tahun 2023 meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Serang mengalami pertumbuhan walaupun peningkatan pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi produksi, lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi adalah lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,57 persen. Peringkat berikutnya ditempati oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencapai 9,01 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,11 persen.

Kenaikan LPE ini dibandingkan tahun 2022 adalah karena beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi atau share besar terhadap perekonomian Kota Serang, yang pada tahun 2023

mengalami pertumbuhan di antaranya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,45 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 20,32 persen, lapangan usaha real estate sebesar 8,90 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,10 persen, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,66 persen. Walaupun mengalami peningkatan, LPE belum mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 5,50 persen sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Serang Tahun 2023.

Tabel 7. 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
di Kota Serang Tahun 2022–2023

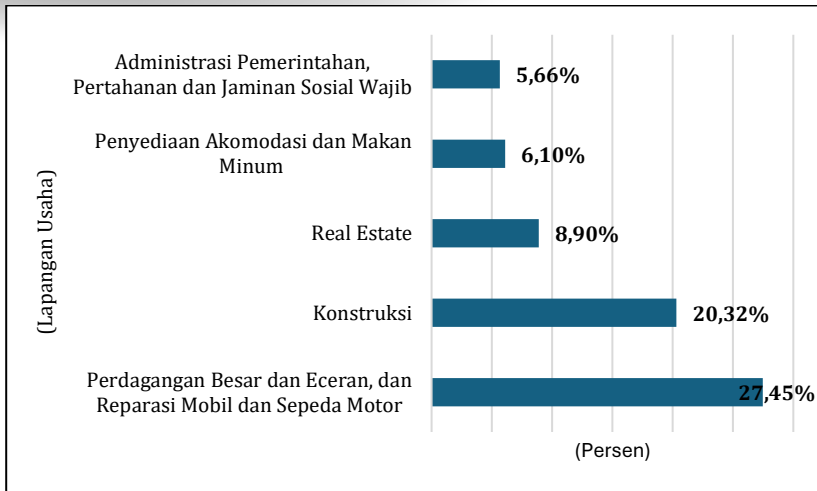
	Lapangan Usaha	2022	2023	LPE
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.087,95	1.127,76	3,66
B	Pertambangan dan Penggalan	1,26	1,26	-0,63
C	Industri Pengolahan	1.158,16	1.224,07	5,69
D	Pengadaan Listrik, Gas	33,59	34,59	2,97
E	Pengadaan Air	7,98	8,43	5,56
F	Konstruksi	4.428,03	4.535,86	2,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.927,55	7.252,35	4,69
H	Transportasi dan Pergudangan	1.152,02	1.217,17	5,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.545,51	1.684,75	9,01
J	Informasi dan Komunikasi	1.669,20	1.804,62	8,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	735,83	763,73	3,79

	Lapangan Usaha	2022	2023	LPE
L	Real Estate	2.561,21	2.654,62	3,65
MN	Jasa Perusahaan	191,07	205,35	7,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.123,89	1.123,66	-0,02
P	Jasa Pendidikan	873,96	930,82	6,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	569,10	612,21	7,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	429,01	474,36	10,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		24.495,32	25.655,61	4,74

Sumber : BPS Kota Serang

7.2 Sektor Lapangan Usaha yang memberikan Kontribusi terbesar terhadap Ekonomi Kota Serang

Struktur perekonomian Kota Serang yang sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, konstruksi, real estate, transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman, masing-masing dengan pangsa pasar 27,45 %; 20,32 %; 8,90 %; 6,10%; dan 5,66%. Sementara itu, 31,57 % tersebar dalam 12 (dua belas) lapangan usaha lainnya.



Sumber : BPS Kota Serang

Gambar 7. 1
Lima Penyumbang Terbesar PDRB Kota Serang Atas Dasar Berlaku
Tahun 2023 (Y-on-Y)
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Struktur perekonomian Kota Serang yang sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, konstruksi, real estate, transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Beberapa gambaran kelima sektor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan didorong oleh mobilitas masyarakat yang meningkat sebagaimana tercermin pada *google mobility index*, terutama pada komponen kunjungan ke retail dan rekreasi

serta toko bahan makanan. Sektor perdagangan tumbuh 4,69 % dipengaruhi oleh pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi *demand* dan *supply* tetap terjaga.

Perbaikan pertumbuhan sektor perdagangan di dukung dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Pada 2023, pertumbuhan total omzet penjualan meningkat. Pendorong utama kinerja adalah perdagangan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan omzet yang tumbuh. Selanjutnya omzet perdagangan kelompok kendaraan meningkat. Omzet perdagangan kelompok suku cadang dan aksesoris juga tumbuh (Laporan Perekonomian Banten, Pebruari 2024, Kantor Perwakilan BI Banten)

2. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 2,44 % dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya kinerja investasi. Pertumbuhan ini disebabkan penyelesaian beberapa proyek strategis Kota Serang pada tahun 2023. Kondisi menggambarkan sektor konstruksi memberi mampu memberikan kontribusi positif pada PDRB Kota Serang. Pasalnya, kontribusi sektor konstruksi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Serang cukup besar yaitu 20,32 %.

Tahun 2023 Pemkot Serang melakukan sejumlah pembangunan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terutama di bidang infrastruktur jalan. Pemkot Kota Serang membangun jalan lintas Kopassus-Umbul Tengah Kelurahan Umbul Tengah yang berada di belakang Markas Grup 1 Kopassus,

jalan Warung Jaud-Kasemen dan Cibening-Cibomo. Pemerintah Kota Serang akan terus berupaya membangun jalur yang layak dilewati untuk masyarakat demi lancarnya jalur ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya.

Selain itu pembangunan beberapa proyek swasta juga berlanjut pada akhir tahun 2023 terutama untuk sektor pembangunan perumahan dan penambahan lokasi produksi industri pengolahan sembari pelaku usaha masih melihat kondisi politik jelang tahun 2024.

3. Sektor Real Estate

Kinerja sektor real estate pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,65 % (Y-on-Y). Sepanjang tahun 2023, kondisi sektor properti makin membaik dan para pengembang pun optimistis pemulihan sektor properti terus berlanjut.

Serang merupakan wilayah strategis yang kian berkembang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. Oleh karenanya, Serang menjadi pilihan utama bagi pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat pekerja dengan segala macam kelengkapan fasilitas serta harga yang terjangkau.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil liasion, peningkatan permintaan akan real estate terutama terjadi pada metode penjualan cash, hal ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan mulai beralihnya pilihan masyarakat untuk mulai berinvestasi ke produk properti. Kedepan, tren pengembang yang meningkat pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan target membangun 10.000 rumah bersubsidi pada tahun 2024 diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah serta dapat meningkatkan Kinerja sektor real estate disamping infrastruktur pendukung kawasan perumahan dan komersial terus dibangun dan terintegrasi.

4. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Tahun 2023, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 5,65 %. Pola belanja masyarakat secara online mendorong kehadiran *marketplace* serta memunculkan fenomena belanja *online* mampu mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan. Perusahaan jasa pengiriman barang (*logistic*) juga bertambah seiring meningkatnya permintaan pengiriman barang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang 2020-2040. Dalam RTWK Kota Serang tersebut, arah pembangunan di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka menjadi daerah Industri dan Perdagangan-Pergudangan. Keberadaan Tol Serang-Jakarta dan dibukanya Tol Serang-Panimbang diharapkan bisa memberikan pengaruh tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka. Oleh karena itu kebutuhan akan pergudangan dan jasa transportasi akan menjadi lebih penting dan strategis.

5. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum di tahun 2023 tumbuh sebesar 9,01 %. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah lama menjadi salah satu tulang punggung ekonomi

nasional. Untuk itu, sudah seharusnya industri pariwisata, khususnya akomodasi wisata, melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah pandemi.

7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Serang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020 – 2040. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Tujuan penataan ruang untuk mewujudkan daerah keterpaduan Pembangunan antar sektor, daerahm dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi invesitasi Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan / atau dunia usaha. Selanjutnya, dalam RTRW Kota Serang Tahun 2020 – 2040 ditetapkan kebijakan dan strategi tata ruang, sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki. Strategi dari kebijakan ini di antaranya yaitu:
 - a. Menetapkan pusat pelayanan;
 - b. Mengembangkan sub pusat pelayanan secara merata;
 - c. Mengembangkan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah secara proporsional;

- d. Menghubungkan antar sub pusat pelayanan dan antara sub pusat pelayanan dengan pusat kota;
 - e. Mendukung pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan secara berimbang;
 - f. Mengembangkan sentrabudi daya yang mendukung pelayanan skala pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan;
 - g. Mengembangkan jaringan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan, dan pusat lingkungan;
 - h. Mendorong pembangunan dan pengembangan pusatlingkungan yang selaras dan seimbang;
 - i. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan / atau administrasi masyarakat pada sub wilayah secara merata; dan
 - j. Mengembangkan sektor potensial untuk mendorong peningkatan investasi dan pendapatan masyarakat.
2. Kebijakan penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. Menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal yang mencakup pusat kegiatan pelayanan sosial, komersial, dan pusat kegiatan wisata;
 - b. Membagi pusat kegiatan pelayanan menjadi 5 (lima) bagian wilayah;
 - c. Menempatkan fasilitas sosial dan ekonomi pada pusatkegiatan sesuai dengan jangkauan pelayanan secara merata;

- d. Mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat; dan
 - e. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah.
3. Kebijakan pengembangan kawasan permukiman pada pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. Menata permukiman kumuh;
 - b. Mengembangkan perumahan bagi masyarakat kurang mampu;
 - c. Merencanakan infrastruktur permukiman secara terpadu; dan
 - d. Mengembangkan kawasan permukiman yang partisipatif.
4. pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. Mendukung pembangunan KP3B;
 - b. Merencanakan tata ruang pada kawasan sekitar pusat pemerintahan;
 - c. Mendukung pengembangan jaringan jalan yang menuju KP3B; dan
 - d. Mengantisipasi pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali.
5. Kebijakan pengembangan fasilitas pendidikan regional. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. Merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala pelayanannya;

- b. Mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan perguruan tinggi; dan
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas pendidikan regional.
6. Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat pelayanan kota, dengan upaya:
 - 1. Mengatur ruter arus pergerakan/lalu lintas melalui regulasi pemerintah daerah, berupa pengembangan jaringan pelayanan angkutan masal dan jaringan lintas angkutan barang serta pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
 - 2. Merevitalisasi fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;
 - 3. Meningkatkan kapasitas ruas jalan utama; dan
 - 4. Meningkatkan akses melalui pengembangan jalan-jalan lingkar utara selatan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas.
 - b. Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya:
 - 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi; dan
3. Mengembangkan pelayanan angkutan umum massal.
- c. Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya:
 1. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A, tipe B dan Tipe C; dan
 2. Membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor.
- d. Mengembangkan sarana penunjuang lain, dengan upaya:
 1. Menambah sarana penunjang jalan;
 2. Meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik;
 3. Mengoptimalisasikan keberadaan sempadanjalur kereta api; dan
 4. Membangun jalur khusus sepeda pada ruas jalur jalan utama dan kawasan pusat perdagangan.
- e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan dengan upaya:
 1. Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan ke seluruh wilayah perkotaan;
 2. Membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber- sumber tenaga listrik;
 3. Mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan;



4. Mengembangkan sumber daya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan; dan
 5. Menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.
- f. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya:
1. Mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;
 2. Menempatkan *hot spot* yang diarahkan pada ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran; dan
 3. Menetapkan pemanfaatan menara bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi.
- g. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya:
1. Memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
 2. Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian;
 3. Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air; dan
 4. Mengoptimalkan keberadaan sempadan bangunan air.

- h. Mengembangkan sistem penyediaan air minum, dengan upaya:
 - 1. Mengembangkan sistem jaringan air bersih yang siap minum; dan
 - 2. Melindungi sumber mata air dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air tanah secara terbatas.
- i. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:
 - 1. Mengolah limbah domestik dengan on site system diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematuan dan melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu di Kecamatan Kasemen; dan
 - 2. Mengolah limbah industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- j. Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya:
 - 1. Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;
 - 2. Menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open *dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*; dan
 - 3. Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada melalui peningkatan peran masyarakat.
- k. Mengembangkan sistem drainase, dengan upaya:
 - 1. Menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air;

2. Memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase; dan
 3. Membuat sodetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi.
7. Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. mengembangkan potensi-potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. mendukung pengembangan sarana pendidikan tinggi; dan
 - d. mengembangkan potensi pariwisata.
8. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan regional dan nasional;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan dan kawasan peruntukan industri di Wilayah Kabupaten Serang;
 - c. mengoptimalkan fungsi kawasan budi daya pada pusat Kota; dan
 - d. mendukung pengembangan kawasan sistem terpadu Provinsi Banten.
9. Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:

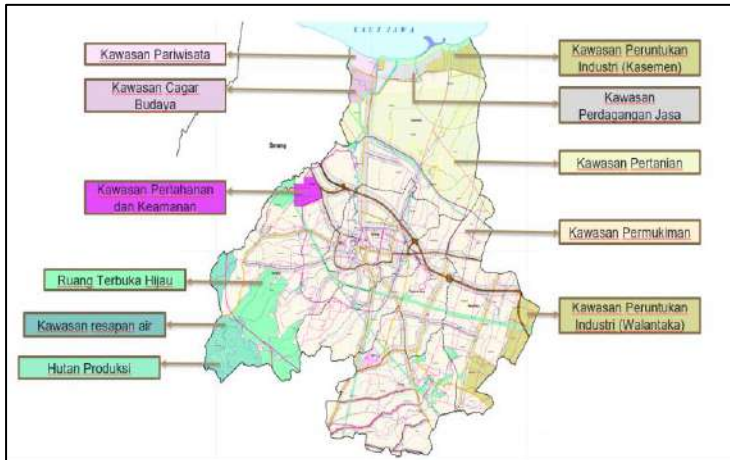
- a. menyusun rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada wilayah bagian selatan dan utara.
10. Kebijakan pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. menjaga kelestarian cagar alam Pulau Dua;
 - b. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 - c. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
 - d. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kegiatan jalur hijau dan RTH;
 - e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
 - g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
 - h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan;
 - i. meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang

- bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
- j. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait DAS; dan
 - k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.
11. pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. merehabilitasi dan menata kawasan cagar budaya Banten Lama sebagai kawasan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mempertahankan dan melestarikan delineasi kawasan cagar budaya Banten Lama sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengamankan Situs cagar budaya Kawasan Banten Lama sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. mengembangkan atraksi dan sarana serta prasarana pariwisata sesuai dengan kewenangannya.
12. Kebijakan pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi kawasan wisata alam. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. mengembangkan kawasan penyangga di sekitar cagar alam yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan RTH;
 - b. mengembangkan kawasan ekowisata; dan
 - c. mengembangkan rute wisata di Daerah.
13. pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:

- a. mengembangkan dan menata kawasan Royal dan Pasar Lama;
 - b. mengembangkan dan menata sektor informal di lingkungan Pasar Induk Rau dan pasar tradisional yang ada di Daerah;
 - c. menata dan mengelola sektor informal di kawasan cagar budaya Banten Lama;
 - d. mengatur persebaran pedagang pada wilayah tertentu sesuai dengan jenisnya;
 - e. mengembangkan kemitraan antara sektor formal dengan sektor informal; dan
 - f. menetapkan regulasi keberadaan sektor informal.
14. penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 - b. merencanakan jalur evakuasi bencana; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
15. penyediaan pedestrian di pusat kota. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. mengembangkan jalur pedestrian sepanjang jalur utama; dan
 - b. mengembangkan jalur pedestrian pada kawasan pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
16. Penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari luas wilayah. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
 - a. menyediakan RTH Privat dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan terbangun;

- b. menyediakan RTH Publik dengan luas paling sedikit 3.043 ha (tiga ribu empat puluh tiga hektar) dari kawasan terbangun;
 - c. melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH;
 - d. mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik;
 - e. menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya;
 - f. membangun RTH pada ruas jalan utama;
 - g. membangun RTH pada lokasi fasilitas umum;
 - h. membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan jaringan jalur kereta api, sempadan jaringan SUTT dan SUTET;
 - i. menghijaukan halaman rumah, perkantoran, dan perdagangan; dan
 - j. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
17. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Adapun strategi dari kebijakan ini, yaitu:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan kewenangannya;
- mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan

budi daya terbangun; dan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan.



Gambar 7. 2
Peta Rencana Pola Ruang RT/RW Kota Serang
Tahun 2020-2040

Kawasan strategis kota Serang dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- Kawasan Perdagangan Pusat Kota di Kecamatan Serang;
- Kawasan Pelabuhan Karangantu; dan
- Kawasan Cepat Tumbuh Kota di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug

Kawasan strategis kota Serang dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdapat di Kawasan Banten Lama. Kawasan strategis kota Serang dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di Kawasan Cagar Alam Pulau Dua .

7.4 Tantangan Ekonomi Kota Serang

Pertumbuhan ekonomi Kota Serang di Tahun 2023 sebesar 4,74 % menggambarkan strategi pemerintah daerah untuk mempertahankan perekonomian di zona positif di akhir tahun 2023. Penanganan Pandemi Covid-19 di tahun 2021 masih memberikan dampak yang besar bagi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah dan masyarakat harus beradaptasi dan menghadapi tantangan terkait ancaman varian Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Serang.

Tantangan Ekonomi selanjutnya adalah meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi di Kota Serang yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang 2020-2040. Dalam RTRW Kota Serang tersebut ada beberapa penambahan arah pembangunan di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka menjadi daerah industri dan perdagangan-pergudangan. Keberadaan Tol Serang-Jakarta dan dibukanya Tol Serang-Panimbang diharapkan bisa memberikan daya ungkit tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota Serang sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan terkait akan beralih sebagian fungsi lahan di kedua kecamatan tersebut dari lahan pertanian menjadi daerah industri dan perdagangan serta pergudangan.

Tantangan ekonomi berikutnya adalah pembiayaan atau pendanaan pembangunan Kota Serang masih terbatas sehingga belum semua kebutuhan pembangunan dapat didanai. Ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi



masih mendominasi proporsi pendapatan daerah Kota Serang tahun 2023. Perlu upaya meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari PAD dengan melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan aturan perundangan. Perlu pemetaan terhadap sumber PAD yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi menjadi prioritas pemasukan pendapatan bagi Kota Serang.

Sektor UMKM merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kota Serang. Oleh karena itu dibutuhkan strategi sektor UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat digitalisasi di jangka pendek saat ini. Geliat perbaikan ekonomi yang ditandai pertumbuhan ekonomi Kota Serang yang tumbuh positif di tahun 2023 menjadi modal bangkitnya kembali UMKM. Perlu pendampingan dan kolaborasi para UMKM untuk meningkatkan daya saing dan naik kelas UMKM ke tingkat global.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

8.1 APBD

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Provinsi Banten diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perkembangan APBD Kota Serang Tahun 2023 (anggaran, realisasi dan persentase realisasi terhadap anggaran) dapat dilihat berikut ini:

8.1 Pendapatan Daerah Kota Serang 2023

Struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Kota Serang tahun 2023 didasarkan pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah mencakup hak-hak daerah yang meningkatkan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.

Jenis pendapatan yang diidentifikasi mencakup antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Semuanya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (termasuk Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah);
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah (meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom mendapatkan kewenangan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Desentralisasi fiskal penting untuk menciptakan keadilan sosial dan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.508.870.966.148,00 atau 94,38 perse belum tercapai optimal dari target pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.598.792.976.402,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp275.700.973.389,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.233.169.992.759,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah target pagu dan realisasi Rp0,00.

Tabel 8. 1
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun
Anggaran 2023

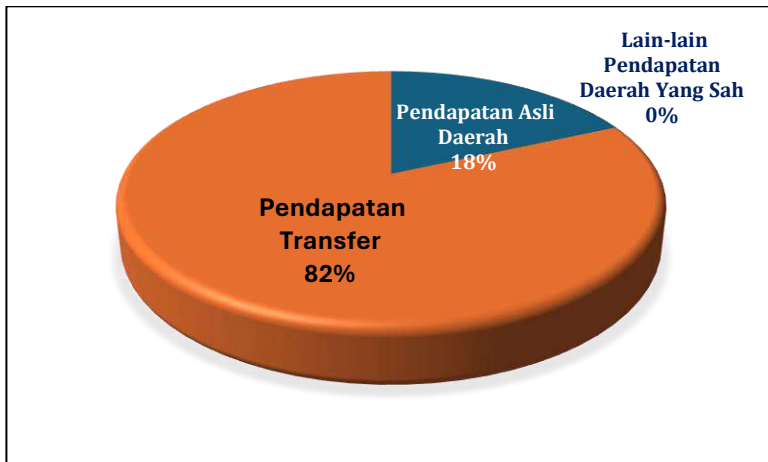
Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian
PENDAPATAN DAERAH	1.598.792.976.402,00	1.498.927.679.025,00	93,75%
A.PENDAPATAN ASLI DAERAH	346.204.502.919,00	271.240.218.617,00	78,35%
Pendapatan Pajak Daerah	226.846.110.000,00	195.311.777.755,00	86,10%
Pendapatan Retribusi Daerah	33.816.357.500,00	8.835.805.587,00	26,13%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.121.586.632,00	995.297.470,00	88,74%
Lain-Lain PAD yang Sah	84.420.448.787,00	66.097.337.805,00	78,30%



Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian
Zakat	0,00	0,00	0,00%
PENDAPATAN TRANSFER	1.252.588.473.483,00	1.227.687.460.408,00	98,01%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	998.632.972.559,00	970.338.482.949,00	97,17%
Dana Bagi Hasil	96.660.575.001,00	81.636.759.536,00	84,46%
Dana Alokasi Umum	628.404.907.000,00	628.404.907.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	43.192.662.558,00	43.602.417.965,00	100,95%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	230.374.828.000,00	216.694.398.448,00	94,06%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	26.251.215.000,00	26.251.215.000,00	100,00%
Dana Insentif Daerah	26.251.215.000,00	26.251.215.000,00	100,00%
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00%
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00%
Dana Desa	0,00	0,00	0,00%
Transfer Pemerintah Daerah	227.704.285.924,00	231.097.762.459,00	101,49%
Dana Bagi Hasil	185.204.285.924,00	188.597.762.459,00	101,83%
Bantuan Keuangan	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00%
Hibah	0,00	0,00	0,00%
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00%

Sumber : LKPD Kota Serang TA.2024 Unaudited (24 Februari 2024)

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2023, masih didominasi oleh Dana Transfer baik yang berasal dari pusat maupun dari antar daerah (Provinsi), yaitu dengan proporsi sebesar 81,73 persen dan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 18,27 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,00 persen.



Sumber : LKPD Kota Serang TA.2024 Unaudited (24 Februari 2024)

Gambar 8. 1
Proporsi Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah
Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang
TA. 2023

8.2. Belanja Daerah Kota Serang 2023

Realisasi Belanja Daerah Kota Serang selama TA. 2023 sebesar Rp. 1.508.593.945.639,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.614.656.217.614,00. Realisasi Belanja

Daerah tersebut terdiri atas realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.287.454.147.324,00. Belanja Modal sebesar Rp. 219.848.431.315,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.291.367.000,00. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2023 terdiri atas 85,34 persen belanja operasi, 14,57 persen belanja modal dan 0,09 persen belanja tidak terduga.

Tabel 8. 2
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

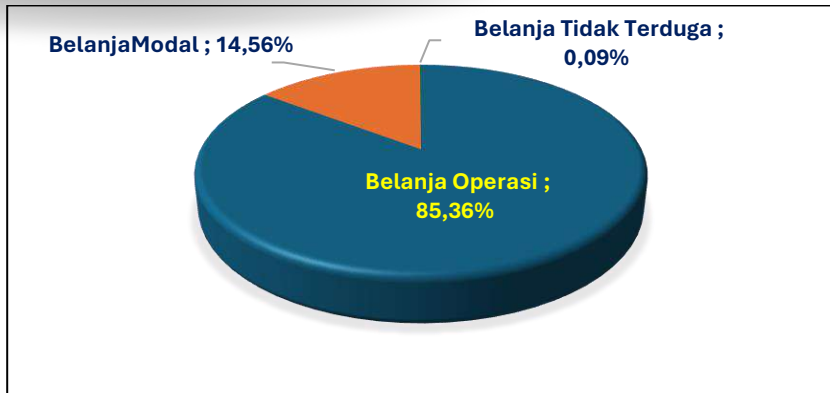
Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Relisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	1.614.656.217.614,00	1.501.493.368.889,00	92,99%
OPERASI	1.365.179.412.874,00	1.281.611.141.389,85	93,88%
Pegawai	673.160.812.489,00	624.378.715.252,00	92,75%
Barang dan Jasa	593.656.091.485,00	560.851.943.201,85	94,47%
Bunga	-	-	0,00%
Subsidi	-	-	0,00%
Hibah	91.823.001.100,00	89.999.470.436,00	98,01%
Bantuan Sosial	6.539.507.800,00	6.381.012.500,00	97,58%
MODAL	248.070.817.669,00	218.590.860.499,15	88,12%
Tanah	7.286.597.000,00	834.377.600,00	11,45%
Peralatan dan Mesin	41.812.942.341,00	37.885.478.675,70	90,61%
Gedung dan Bangunan	52.275.198.322,00	41.242.023.784,00	78,89%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.998.126.895,00	127.472.720.384,00	94,43%
Aset Tetap	11.218.953.111,00	10.679.420.055,45	95,19%
Aset Lainnya	479.000.000,00	476.840.000,00	99,55%
TIDAK TERDUGA	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	91,85%
Tidak Terduga	1.405.987.071,00	1.291.367.000,00	91,85%



Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Relisasi	Capaian
TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL	0,00	0,00	0,00%
Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0,00	0,00	0,00%
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00%

Sumber : LKPD Kota Serang TA.2024 Unaudited (24 Februari 2024)

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2023 terdiri atas 85,34 persen belanja operasi, 14,57 persen belanja modal dan 0,09 persen belanja tidak terduga.



Gambar 8. 2
Proporsi Kontribusi Jenis Belanja Daerah
Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2023

Anggaran belanja daerah pemerintah Kota Serang pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.614.656.217.614,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.501.493.368.889,00 atau persentase pencapaian sebesar 92,99 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Daerah Kota Serang tahun 2023 masih belum optimal dan Belanja Operasi masih mendominasi Belanja Kota Cilegon (85,36 %). Oleh karena itu, perlu didorong dalam peningkatan dan kualitas Belanja Modal lebih dari 30 % untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya (tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud) yang menstimulus pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kota Serang.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Serang pada tahun anggaran 2023 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 sebesar Rp 1.281.611.141.389,85,00 atau mencapai 85,36 % dari total belanja daerah. Artinya dari total realisasi belanja daerah Kota Serang sebesar Rp 1.501.493.368.889,00 maka 85,36 %-nya habis digunakan untuk belanja operasi. Terdapat 2 jenis belanja dalam Belanja Operasi yang paling besar yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 624,37 miliar dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 560.85 miliar. Kedua belanja ini memiliki share 92,48 % dari total Belanja Operasi.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur APBD yang digunakan untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota Serang. Belanja modal direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 248.070.817.669,00 dengan realisasi sebesar Rp 218.590.860.499,15 atau sebesar 88,12 %. Komponen Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal hanya sebesar 14,56 % dari Total Belanja Daerah, padahal Pemerintah Pusat mendorong kepada



Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Belanja Modal sebesar 30% dari Total Belanja Daerahnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang untuk tahun 2023, terdapat alokasi dana untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). BTT merupakan bentuk pengeluaran yang disiapkan untuk situasi darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian dana atas pembayaran berlebih dari tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud mencakup bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghambat pelayanan publik.

Pada tahun 2023 total alokasi Belanja Tidak Teduga (BTT) sebesar Rp 1.405.987.071,00 dengan realisasi mencapai Rp 1.291.367.000,00 atau sekitar 91,85 %. Realisasi BTT menggambarkan signifikansi kondisi darurat yang terjadi pada tahun berjalan, dengan angka yang hanya 0,09 % maka hal ini menggambarkan minimalnya kondisi darurat yang terjadi di Kota Serang yang tidak dapat diantisipasi oleh APBD secara umum.

8.3 Pembiayaan Kota Serang 2023

Realisasi Pembiayaan Netto Kota Serang TA. 2023 sebesar Rp15.863.504.212,00 atau 100,00 persen dari Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.863.241.212,00. Realisasi



Pembiayaan Netto merupakan hasil pengurangan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp32.086.504.212,00, yang seluruhnya berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp16.250.000.000,00, yang dikeluarkan sebagai Dana Cadangan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tabel 8. 3
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun
Anggaran 2023

Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian
PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	15.863.241.212,00	15.863.241.212,00	100,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.113.241.212,00	32.113.241.212,00	100,00%
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	32.113.241.212,00	32.113.241.212,00	100,00%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00



Uraian	Jumlah		
	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	100,00%
Pembentukan Dana Cadangan	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00	100,00%
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	13.297.551.348,00	-

Sumber : LKPD Kota Serang TA.2024 Unaudited (24 Februari 2024)

Untuk menganalisis Pembiayaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2023, kita perlu memahami dua komponen utama dalam pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah sumber pendanaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Sumber penerimaan pembiayaan ini biasanya berasal dari:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Dana yang tersisa dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- Pencairan Dana Cadangan: Jika ada dana cadangan yang dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana ini bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pembiayaan.
- Pinjaman Daerah: Dana yang diterima dari pihak ketiga melalui pinjaman yang harus dikembalikan di masa mendatang.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban atau untuk membiayai pembelanjaan investasi jangka panjang. Komponen utama dari pengeluaran pembiayaan meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan: Pengalokasian dana untuk cadangan yang akan digunakan pada masa mendatang.
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: Pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam perusahaan daerah atau bentuk lain dari investasi.

- **Pembayaran Pokok Pinjaman:** Pengeluaran yang digunakan untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo.

Berdasarkan tabel 8.3 mengenai Realisasi Pembiayaan Daerah pada APBD Kota Serang 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya: Kota Serang menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 32,11 miliar sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun anggaran sebelumnya, terdapat dana yang tidak terpakai yang kemudian dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan anggaran tahun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan: Dari pengeluaran pembiayaan yang ada, Kota Serang mengalokasikan Rp 16,25 miliar untuk pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini adalah langkah strategis untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau investasi di masa mendatang, memberikan stabilitas keuangan jangka panjang dan menunjukkan adanya perencanaan yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Setelah melakukan berbagai pengeluaran pembiayaan, termasuk pembentukan dana cadangan, Kota Serang masih

memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 13,29 miliar. SILPA ini menunjukkan bahwa setelah semua kewajiban dan alokasi dana dipenuhi, masih ada dana yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa anggaran dikelola dengan cukup efisien, dan ada potensi untuk penggunaan dana lebih lanjut di tahun berikutnya.

Penggunaan SiLPA dari tahun sebelumnya sebesar Rp 32,11 miliar dan adanya sisa anggaran sebesar Rp 13,29 miliar setelah pembentukan dana cadangan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien. Kota Serang berhasil memanfaatkan sisa anggaran tahun lalu dengan baik sambil tetap menyisakan dana untuk keperluan mendatang. Alokasi Rp 16,25 miliar untuk dana cadangan menegaskan adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang berimbang, di mana pemerintah tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini tetapi juga mempersiapkan diri untuk kebutuhan mendesak di masa depan. Sisa SiLPA sebesar Rp 13,29 miliar mengindikasikan bahwa Kota Serang memiliki kesehatan keuangan yang baik, dengan kemampuan untuk menutup berbagai kewajiban pembiayaan dan tetap menyimpan surplus untuk tahun berikutnya. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Dengan adanya sisa dana yang cukup besar, Kota Serang memiliki potensi untuk melakukan investasi lebih lanjut atau mengembangkan program-program yang membutuhkan pendanaan tambahan tanpa harus terlalu bergantung pada sumber pendapatan baru. Secara keseluruhan, APBD Kota Serang 2023 mencerminkan pengelolaan keuangan yang bijaksana, dengan pemanfaatan optimal dari SILPA sebelumnya,

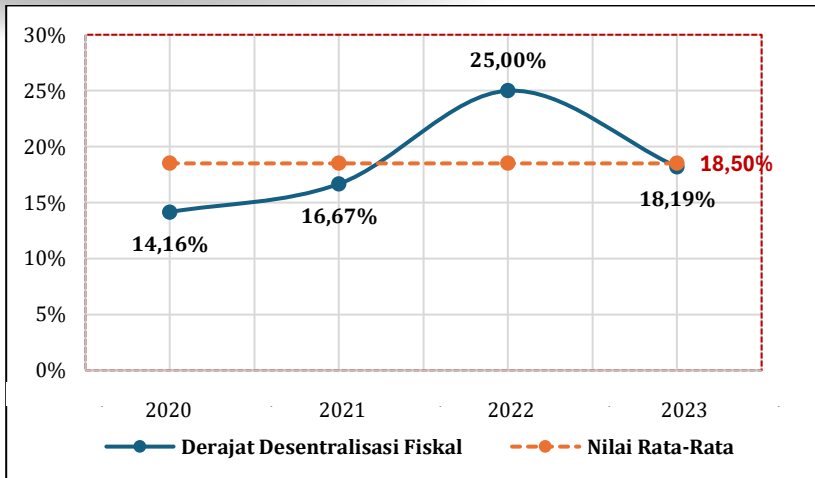
pembentukan cadangan strategis, dan pencapaian sisa anggaran yang sehat.

8.4 Kinerja APBD Kota Serang tahun 2023

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Seperti halnya dalam anggaran, perhitungan derajat desentralisasi fiskal diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Tingkat derajat desentralisasi fiskal direpresentasikan oleh satuan persen yang menunjukkan persentase tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat.

Rasio ini menunjukkan realisasi derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 3
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Serang Tahun 2020-2023

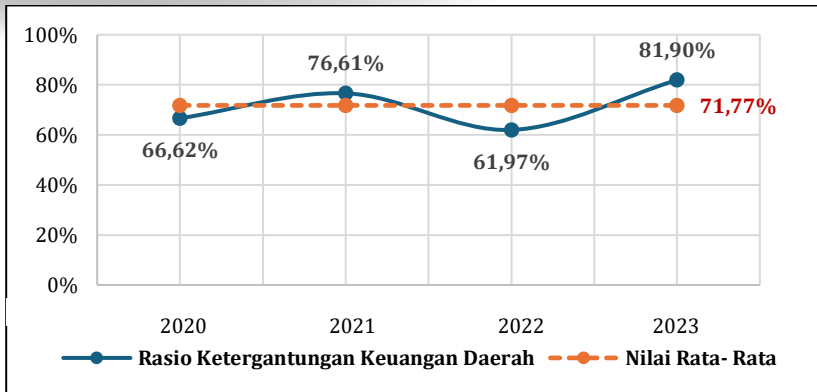
Pada Gambar 8.3 ditunjukkan perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Serang. *Trendline* yang ditunjukkan pada grafik memperlihatkan secara realisasi derajat desentralisasi Kota Serang selama kurun 2020-2023 mengalami fluktuatif. Periode 2020-2022, realisasi PAD terhadap total penerimaan daerah di Kota Serang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 sebesar 14,16 persen meningkat menjadi sebesar 16,67 persen di tahun 2020, kemudian meningkat lebih tinggi menjadi 25,00 persen di tahun 2022, namun menurun tajam menjadi 18,19 persen pada tahun 2023.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Serang terus mengalami perkembangan pada realisasi PAD dan total pendapatan daerah pada periode 2020-2022 dan menurun pada

tahun 2023. Namun, potensi pendapatan asli daerahnya Kota Serang selama 4 tahun menunjukkan tendensi yang sangat rendah dalam memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan dan membiayai kebutuhan belanja di daerahnya, yang diperlihatkan dari nilai rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota Serang sebesar 18,50 persen. Artinya kemampuan realisasi pendapatan asli daerah hanya bisa didapatkan hanya sebesar 18,50 persen dari total pendapatan daerahnya.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Realisasi rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan dana yang diterimanya dari pemerintah pusat. Keberhasilan dalam merealisasikan anggaran ini sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, menjalankan program-program pembangunan, dan mencapai target kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 4
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Serang
Tahun 2020-2023

Pada Gambar 8.4 perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah yang menunjukkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Serang mengalami pergerakan fluktuatif pada rentang tahun 2020-2023. Peningkatan realisasi rasio ketergantungan keuangan daerah terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Sedangkan pada periode lainnya cenderung menunjukkan penurunan. Besaran rasio ketergantungan pada tahun 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada awal periode, dan nilainya di atas nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Serang sebesar 71,77 persen.

Tabel 8. 4

Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga, 2017

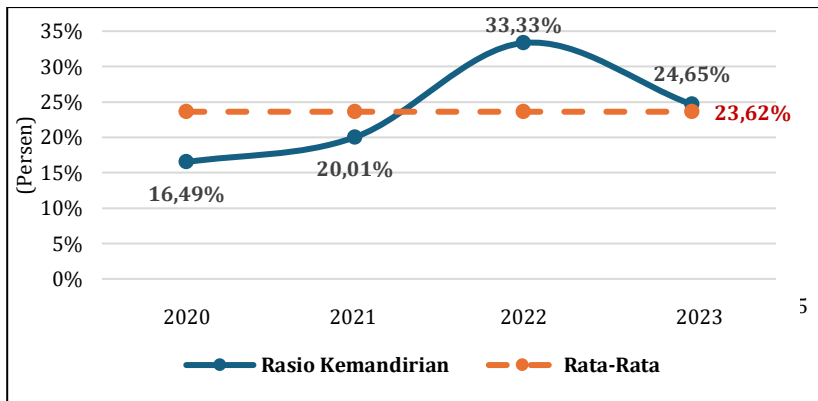
Hasil analisis realisasi rasio ketergantungan keuangan daerah pada Kota Serang menunjukkan pada awal periode yaitu tahun 2020 angka rasio ketergantungan daerah sebesar 66,62 persen yang kemudian meningkat menjadi 76,61 persen pada tahun 2021. Namun pada periode selanjutnya realisasi rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Serang menurun menjadi 61,97 persen pada tahun 2022, namun, meningkat kembali menjadi 81,90 persen pada tahun 2023. Hal menggambarkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Serang sangat tinggi ketergantungan keuangan dari Kota Serang terhadap pemerintah pusat dari kriteria lebih besar dari 50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa selama periode 2020-2023 kondisi dan kinerja keuangan Kota Serang terkait rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat secara rata-rata sebesar 71,77 persen.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah memperlihatkan tingkat ketergantungan atau kemandirian suatu daerah terhadap

bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemda lain. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian daerah tersebut semakin tinggi.

Perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dilakukan dalam meninjau kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Serang
Tahun 2020-2023

Pada Gambar 8.5 di atas memperlihatkan bahwa pada kurun waktu 2020-2023 rasio kemandirian Kota Serang cenderung meningkat secara signifikan periode 2020-2022 mencapai angka 16,49 persen menjadi 33,33 persen di tahun

2022, namun menurun menjadi 24,65 persen di tahun 2023. Rasio kemandirian keuangan Kota Serang tergolong pada kategori kemampuan keuangan rendah sekali dilihat dari nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 23,82 persen dibawah kriteria 0-25 persen. Ini menunjukkan kondisi realisasi PAD di Kota Serang nilainya lebih besar dari bantuan pemerintah pusat.

Tabel 8. 5
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Mahsun, 2012

Hasil analisis rasio kemandirian Kota Serang termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan delegatif menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat masih dominan terhadap Kota Serang dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Aktivitas Belanja Daerah

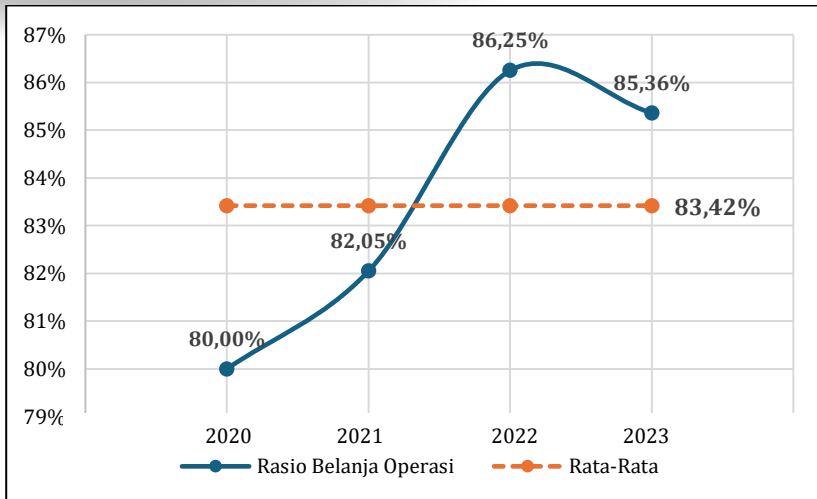
Pada analisis rasio aktivitas akan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi atau belanja modal. Sebagaimana

pada anggaran, analisis rasio aktivitas pada realisasi mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu: (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) dan Belanja Tak Terduga.

Analisis proporsi belanja operasional dan belanja modal bermanfaat untuk mengetahui gambaran pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal untuk secara optimal.

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

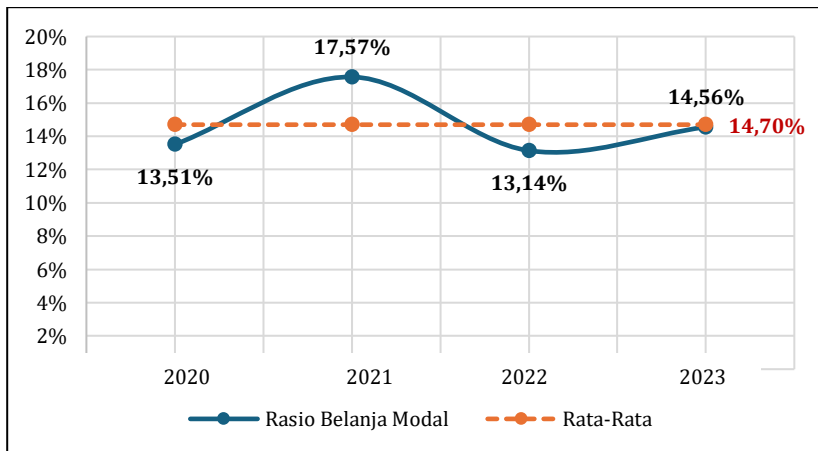
Gambar 8. 6
Rasio Belanja Operasi Kota Serang 2020-2023

Trendline yang ditunjukkan Gambar 8.6 kondisi yang fluktuatif dan rasio belanja operasi pada Kota Serang meningkat dari awal tahun 2020 sebesar 80,00 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat pada angka 82,05 persen, dan kembali meningkat tahun 2022 menjadi sebesar 86,25 % persen, namun pada tahun 2023 menurun mencapai 85,36 persen. Nilai rasio belanja operasi pada tahun 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio pada awal periode.

Nilai rata-rata rasio belanja operasi Kota Serang periode 2020-2023 sebesar 83,42 persen. Artinya belanja daerah Kota Serang sebesar 83,42 persen-nya digunakan untuk belanja

operasional yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Selain rasio belanja operasi, pada penilaian rasio aktivitas juga mempertimbangkan rasio Belanja Modal. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat investasi.

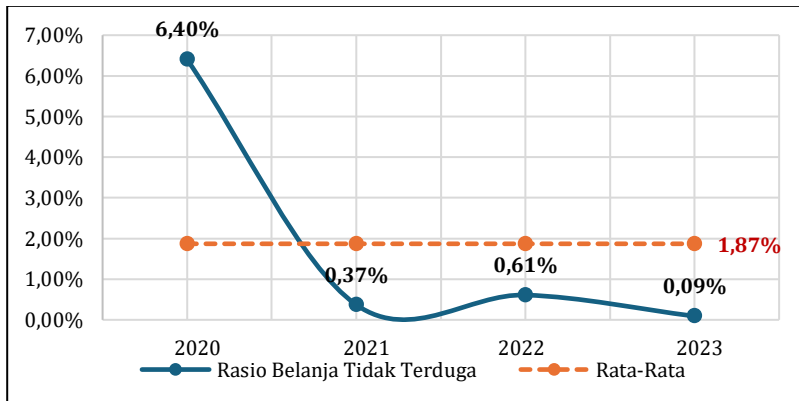


Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 7
Rasio Belanja Modal Kota Serang Tahun 2020-2023

Berbeda dengan rasio belanja operasi, dapat dilihat pada gambar 8.7 belanja modal di atas bahwa rasio pada Kota Serang terlihat *trendline* yang ditunjukkan cenderung berfluktuatif. Rasio belanja modal pada Kota Serang sejak awal tahun 2020 sebesar 13,51 persen, kemudian terus mengalami peningkatan sebesar 17,57 persen pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 13,14 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat sebesar 14,56 persen pada tahun 2023. Nilai rata-rata rasio belanja modal Kota Serang selama periode 2020-2023 sebesar 14,70 %.

Komponen selanjutnya yaitu realisasi Rasio Belanja Tak Terduga yang merupakan pengeluaran daerah yang tidak terprediksi sebelumnya dan tidak termasuk dalam rencana anggaran reguler. Merupakan pengeluaran daerah yang bersifat mendadak dan darurat.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 8
Rasio Tak Terduga Kota Serang Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan kondisi yang cukup berbeda dengan kondisi anggaran rasio tak terduga, dimana pada realisasi menunjukkan *trendline* yang meningkat pada satu periode yaitu tahun 2020. Peningkatan tersebut sangat tinggi, dimana pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama bahwa realisasi rasio belanja tak terduga melonjak tajam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi rasio belanja tak terduga tidak sesuai dengan kondisi anggaran karena adanya kondisi atau fenomena yang darurat, sehingga seluruh wilayah mengalami peningkatan. Namun pada periode-periode selanjutnya kembali menunjukkan penurunan yang signifikan dan kembali pada kondisi normal. Realisasi belanja tak terduga pada periode lain di luar periode tahun 2020 cenderung sangat rendah, bahkan berada bawah 1 persen dari pengeluaran tidak terduga.

Untuk ketiga rasio belanja ini, belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional

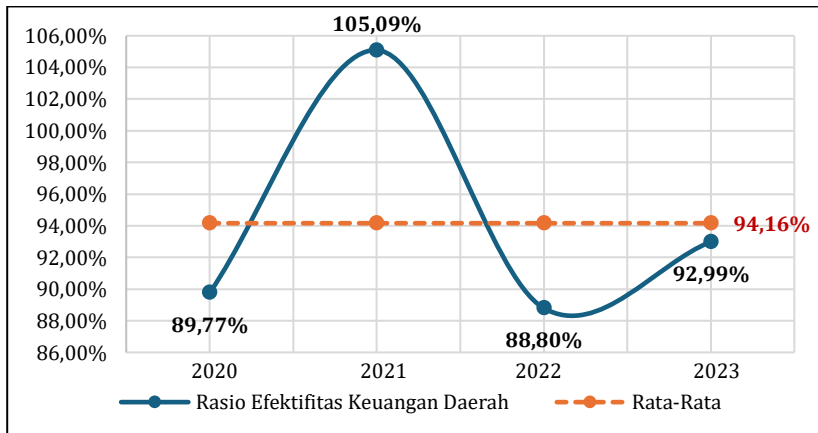
rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola Keuangan Daerah yang memadai.

Belanja Daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian outcome pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Selain itu, Belanja Daerah sering kali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada akhirnya output dan kalau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional.

Untuk itu, diperlukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan semakin baik (Mahmudi, 2010).



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 9
Rasio Efektivitas Kota Serang Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar di atas perkembangan rasio EKD, jika dilihat berdasarkan besaran rasio EKD Kota Serang periode 2020-2023 berfluktuatif. Periode awal tahun 2020 sebesar 89,77 persen meningkat menjadi 105,05 persen pada tahun 2021,

kemudian turun menjadi 88,80 persen pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 92,99 persen. Rata-rata nilai rasio EKD Kota Serang periode 2020-2023 memiliki nilai sebesar 94,16 persen.

Tabel 8. 6
Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

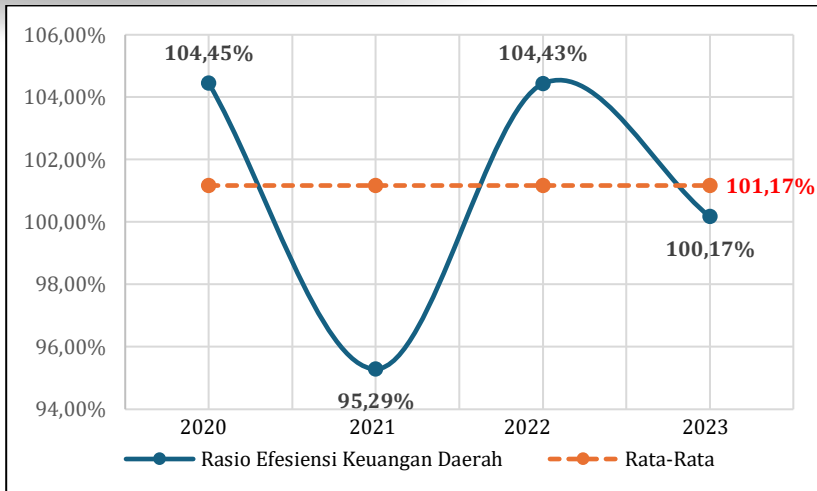
Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Sumber: Mahsun, 2012

Berdasarkan kriteria tingkat efektifitas keuangan daerah Kota Serang nilai rata-rata EKD-nya sebesar 94,16 persen termasuk pada kategori tidak efektif karena nilainya kurang dari 100 persen. Artinya, rata-rata pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai 100 persen dari target PAD-nya.

6. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berbeda dengan perhitungan rasio efektivitas, hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.



Sumber: BPS Kota Serang (diolah) 2023

Gambar 8. 10
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Serang
Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi rasio efisiensi keuangan daerah Kota Serang menunjukkan *trendline* yang fluktuatif, namun tidak terjadi pergerakan yang drastis sepanjang periode 2018-2023. Realisasi rasio efisiensi Kota Serang sendiri secara umum mengalami sedikit penurunan jika dilakukan perbandingan antara periode awal dan periode akhir. Meskipun sempat meningkat pada beberapa periode, namun pada tahun 2023 cenderung menunjukkan adanya penurunan.

Tabel 8. 7
Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisien	$X < 100\%$

Sumber: Mahsun, 2012

Nilai rata-rata realisasi rasio efisiensi Kota Serang sebesar 101,17 persen sehingga menurut kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah yang terkategori tidak efisien. Artinya, perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan nilainya lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Serang perlu melakukan upaya yang lebih lagi dalam menekan jumlah belanja daerahnya untuk menghasilkan tingkat pendapatan.

Untuk itu pemerintah daerah Kota Serang perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

BAB IX INFLASI

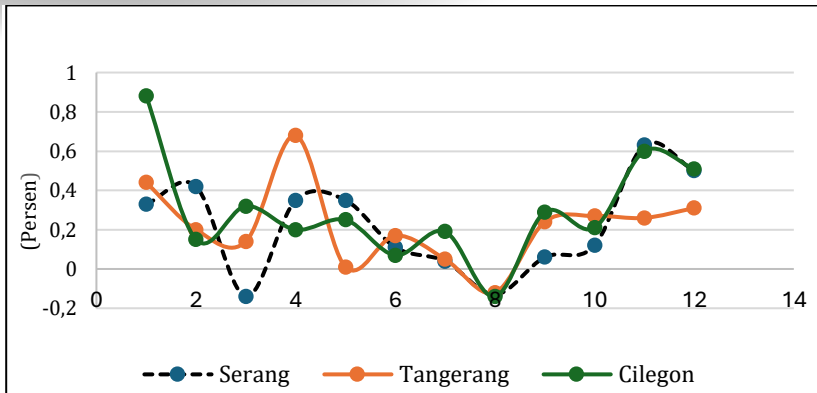


Perekonomian dunia sedang menghadapi banyak ketidakpastian. Dirupsi geopolitik juga menyebabkan krisis pangan dan krisis energi. Akibatnya, seluruh negara dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan ancaman inflasi yang tinggi. Selain itu, karena curah hujan yang mulai berkurang, yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian, dampak El Nino harus terus diperhatikan.

Inflasi tahun 2023 tercatat tetap terkendali pada rentang sasaran $3\% \pm 1$ yaitu pada level 2,28% (y-on-oy), di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditas pangan dan energi global. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan gejolak harga di tengah berbagai tantangan.

Realisasi inflasi 2023 didukung oleh inflasi *volatile food* (VF) yang terkendali, inflasi *administered prices* (AP) yang terus melandai dan inflasi *core/inti* yang terjaga stabil. Di tengah gejolak harga energi dan komoditas pangan di seluruh dunia, serta ancaman el nino, inflasi Indonesia relatif terkendali.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada tahun 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang.



Sumber : BPS Provinsi Banten data diolah

Gambar 9. 1
Perkembangan Inflasi Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota
Tangerang Bulan Januari–Desember 2023

Gambar 9.1 menunjukkan tren inflasi nasional, provinsi dan 3 kota di Provinsi Banten dari Januari-Desember 2023 cenderung berfluktuasi. Namun, masih ditemukan sejumlah harga komoditas pangan yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten/Kota lain yang dapat menyebabkan perbedaan harga sejumlah komoditas pangan. Beberapa faktor lokal yang mempengaruhi inflasi, seperti biaya hidup yang tinggi di Kota Cilegon sebagai kota industri berskala nasional dan Kota Serang sebagai Ibu Kota Pemerintahan Provinsi Banten. Secara struktur ekonomi, kedua kota ini tidak berbasis pada pertanian yang merupakan komoditas yang memiliki bobot terbesar dalam inflasi. Kondisi inilah yang menyebabkan inflasi di Kota Serang dan Kota Cilegon masih di atas nilai inflasi nasional.

Untuk mencapai sasaran inflasi inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen pada tahun 2023, pemerintah berusaha mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga. Dengan bekerja sama antara pusat dan daerah, upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat. Ini akan mencakup mengoptimalkan APBN dan APBD untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah Daerah menggunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Untuk memantau dan memastikan komitmen daerah terhadap pengendalian inflasi, Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah.

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sebagai stimulus. Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8 triliun dibagi menjadi dua bagian, Rp 4 triliun diberikan untuk kinerja tahun 2022, terdiri dari Rp 3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp 1 triliun untuk daerah tertinggal berkinerja baik. Sementara itu, Rp 4 triliun diberikan untuk kinerja tahun 2023, terdiri dari Rp 1 triliun untuk kinerja pengendalian inflasi dan Rp 3 triliun untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang menerima penghargaan Insentif Fiskal dari Kemenkeu atas upaya keras mereka dalam mengendalikan inflasi. Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Provinsi Banten sebagai salah satu dari sepuluh wilayah yang mampu

mengendalikan dan menekan inflasi dengan efektif. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10,37 miliar adalah hadiah yang diberikan. Sementara itu, dari 85 pemerintahan kota di Indonesia, hanya 6 pemerintahan kota, termasuk Pemerintah Kota Serang, diberi penghargaan atas kemampuan mereka dalam menangani inflasi daerah. Berhasil mengendalikan inflasi, Kota Serang menerima insentif sebesar Rp 9 miliar dari pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi, yang mencapai 7,2 % dari Januari hingga Pebruari 2023, tetapi turun menjadi 3,7 % pada Juli 2023 (Radar Banten, 31 Juli 2023).



Sumber : Radar Banten, 31 Juli 2023

Gambar 9. 2
Walikota Serang Syafrudin mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal oleh Mendagri Tito Karnavian

Dengan insentif ini, pemerintah daerah diharapkan dapat secara aktif mengawasi dan mengontrol harga komoditas makanan seperti beras, telur, cabe, ayam, ikan, dan sebagainya. Tidak boleh menambah gaji, penghasilan, honorarium, atau berbagai perjalanan dinas dengan insentif fiskal; sebaliknya, insentif harus digunakan langsung untuk tujuan yang menguntungkan masyarakat. Bantuan modal, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk UMKM, beasiswa, dan inisiatif komunitas yang membantu orang miskin dapat termasuk dalam kategori ini.

Selain itu, diharapkan bahwa insentif fiskal akan mendorong pemerintah daerah secara konsisten untuk mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Akibatnya, kegiatan ekonomi di daerah akan lebih menggeliat. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sebagai *shock absorber* dengan menerapkan kebijakan transfer ke daerah.

Belanja daerah dapat memiliki dampak pada pengendalian inflasi. Ketika pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran secara berlebihan, hal ini dapat memicu kenaikan harga. Sebaliknya, jika belanja daerah dikurangi atau dikendalikan dengan baik, hal itu dapat membantu menjaga stabilitas harga dalam perekonomian. Pengendalian belanja daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengatur inflasi, karena pengeluaran yang terlalu besar dapat menyebabkan permintaan yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah yang bijaksana dan terencana dapat berkontribusi pada upaya pengendalian inflasi.

Selain itu, belanja daerah yang diarahkan pada proyek infrastruktur atau program pengembangan ekonomi lokal dapat memiliki efek positif dalam mengendalikan inflasi. Investasi dalam proyek-proyek ini dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, yang pada akhirnya dapat menekan lonjakan harga. Namun demikian, penting untuk memperhatikan pengeluaran yang tepat sasaran dan efektif agar tidak justru memperburuk masalah inflasi

Implementasi Strategi dan Kebijakan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten telah melakukan beberapa program koordinasi dalam rangka menjaga kestabilan inflasi. Secara umum, pengendalian inflasi tetap mengacu pada prinsip 4K yakni: (1) Ketersediaan Pasokan, (2) Kelancaran Distribusi, (3) Keterjangkauan Harga dan (4) Komunikasi Efektif. Secara spasial inflasi kota sampel IHK juga melandai di awal tahun 2023.

Secara khusus, beberapa strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten, sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

Pengalokasian dana 2% DTU (Dana Transfer Umum) pada setiap daerah dan realisasi atas belanja tidak terduga terkaitantisipasi dampak kenaikan harga BBM berupa BLT dan bansos kepada masyarakat di Provinsi Banten.

- a. Sinergi dengan berbagai stakeholders terkait, seperti Bulog, PT ABM, PT RNI, BUMD Kabupaten dan kota, retailer, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan di Banten.
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan penyaluran Bansos yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) kepada ojek online, pelaku UMKM, KPM, PKH, dan BPNT, keluarga berisiko stunting, penyandang disabilitas.
- c. Pemerintah Kota Tangerang memberikan diskon pajak 70% untuk PBB-P2 dan 25% untuk BPHTB.
- d. Pelaksanaan Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan komoditas Beras di Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang.
- e. Pelaksanaan Pasar Murah (TPID Provinsi dan Kabupaten Kota Serang). Menyelenggarakan 119 kali Operasi Pasar Murah di Wilayah Provinsi Banten dengan pemberian dukungan Fasilitas Booth, Subsidi Ongkos Angkut Klaster Pangan BI.
- f. TPID Kota Serang melakukan sosialisasi Peraturan Walikota perihal tarif angkutan di dalam kota dengan menetapkan tarif flat ke seluruh rute dalam rangka menjaga risiko tekanan inflasi dari angkutan darat.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pelaksanaan Program Pangan Lestari (P2L) atau urban farming untuk hortikultura dan palawijakep ada



- masyarakat, petani, PKK kelurahan/desa dan komunitas perempuan.
- b. Pembinaan klaster-klaster ketahanan pangan komoditas beras, cabai dan bawang merah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pelatihan terkait.
 - c. Pemberian pendampingan dan bantuan teknis pertanian seperti irigasi dan metode tanam berbasis digital untuk mendukung ketahanan pangan dengan penggunaan dana APBD dan APBN.
 - d. Implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) skema B2B melalui peran BUMD dan PD Pasar di daerah masing-masing.
 - e. TPID Provinsi Banten melaksanakan pemberian vitamin dan antibiotik serta melaksanakan isolasi pada hewan ternak terduga terjangkit penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu Dinas Pertanian Provinsi Banten telah memberikan 24.527 dosis vaksin PMK kepada hewan ternak untuk menjaga ketersediaan pasokan daging.
 - f. Koordinasi dengan Perum Bulog dan PT ABM selaku BUMD dalam rangka optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) untuk mendukung ketersediaan pasokan beras di wilayah Serang.
 - g. Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras oleh Bulog Lebak, Serang, dan Tangerang utamanya pada komoditas beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Realisasi SPHP Beras Jan-Mar2023 di

Lebak, Pandeglang, Serang Raya mencapai 2,62 ribu ton (Bulog).

- h. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pasar Murah (TPID Provinsi dan Kabupaten Kota Serang).
- i. Melakukan Operasi Pasar Murah sebanyak 119 kali di Wilayah Provinsi Banten dengan pemberian dukungan Fasilitas Booth, Subsidi Ongkos Angkut Klaster Pangan BI.
- j. Melaksanakan Gebyar Pangan Murah (GPM) serentak nasional pada 26 Juni 2023 yang diselenggarakan di Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.
- k. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama Mitra Kelompok Tani Binaan PT. Manunggal Agribisnis Di Kabupaten Serang, Banten.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Kerjasama hilir *digital farming* melalui platform online seperti Plaza Banten, pesan antar online, dll untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
- b. Kerjasama Program Toko Tani dengan angkutan online roda dua guna memberikan layanan antar pesanan secara gratis dengan maksimal jarak tertentu yang telah disepakati.
- c. Melanjutkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan perbaikan sejumlah ruas jalan terutama pada sentra-sentra produksi lokal guna mendukung distribusi pangan dan meningkatkan penjualan petani.
- d. Penyaluran subsidi transportasi bahan pangan pada kegiatan pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog

serta didukung pemanfaatan lahan kosong dengan integrated farming.

- e. Inisiasi penguatan Wanten (Warung Banten) milik PT Agrobisnis Banten Mandiri, BUMD Pangan Provinsi Banten, sebagai penyalur komoditas pangan utama dan perluasan KAD BUMD Pangan di Kota/Kab ke sentra (Blitar, Lampung, Brebes, Banyuwangi).

4. Komunikasi Efektif

- a. *High Level Meeting* maupun Rapat Koordinasi TPID terkait Program Prioritas Pengendalian Inflasi tahun 2023 di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan pembahasan terkait pengendalian komoditas penyumbang inflasi pada Triwulan II 2023 dan persiapan menjelang HBKN Idul Adha, dengan tindak lanjut pelaksanaan sejumlah kegiatan, yakni Pasar murah, pemantauan harga, penanaman oleh masyarakat, dan PKK.
- b. Melakukan *moral suasion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat bersinergi dengan Komisi XI DPR RI, tokoh agama, dan media terkait inflasi dan bijak berbelanja.
- c. Senantiasa melakukan update harga barang pokok dan penting di daerah setempat guna mengendalikan harga.
- d. TPID Provinsi Banten melaksanakan monitoring realisasi anggaran Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2023 bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

- e. Rakor Monitoring realisasi anggaran cadangan pangan pemerintah (CPP) 2023 dengan Disketapang Banten.

Selama tahun 2023, tren pengendalian inflasi tiga kota di Provinsi Banten menunjukkan penurunan. Pemerintah Provinsi Banten menggunakan metode *bottom up dan top down* yang saling menguatkan untuk mengendalikan inflasi dengan baik. Kerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota serta *stakeholder* lainnya serta dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan berbagai analisis untuk menentukan tindakan dan kebijakan.

Kebijakan fiskal yang digunakan melalui alokasi dana APBN dan belanja APBN dianggap berhasil dalam mengurangi dan menjaga inflasi daerah di Provinsi Banten.

Rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten ditekankan diantaranya : (1) Mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga; (2) Memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional; (3) Mendorong perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas panga di daerah; dan (4) Memantau pergerakan harga, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris.



Referensi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.(2023).
*Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023*. Serang:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Banten
Pebruari 2023*. Serang. [https://www.bi.go.id/id/
publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-
Provinsi-Banten-Februari-2024.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Banten-Februari-2024.aspx)

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). Indeks
pembangunan manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten 2021-2023.

BPS Provinsi
Banten. (n.d.). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Klasifikasi
Daerah di Provinsi Banten. [https://banten.bps.go.id
/indicator/23/427/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-
dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-
kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html](https://banten.bps.go.id/indicator/23/427/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html)

Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2024). *Produk Domestik
Regional Bruto Kota Serang Menurut Pengeluaran 2019-
2023*.[https://serangkota.bps.go.id/publication/2024/04/3
0/3ad9058aad3f51c0d80f923e/produk-domestik-
regional-bruto-kota-serang-menurut-pengeluaran-2019-
2023.html](https://serangkota.bps.go.id/publication/2024/04/30/3ad9058aad3f51c0d80f923e/produk-domestik-regional-bruto-kota-serang-menurut-pengeluaran-2019-2023.html)

.....(2024). *Produk Domestik
Regional Bruto Kota Serang Menurut Lapangan Usaha 2019-*



2023.<https://serangkota.bps.go.id/publication/2024/04/04/3b9e6793e24b161254f12166/produk-domestik-regional-bruto-kota-serang-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>

_____.(2024). *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Serang 2023*
<https://serangkota.bps.go.id/publication/2024/03/21/cc2b39942930dc0634718b7a/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-kota-serang-2023.html>

_____.(2024). *Serang Dalam Angka 2024*. <https://serangkota.bps.go.id/publication/2024/02/28/544d85db796d8722843c49d7/kota-serang-dalam-angka-2024.html>

_____.(2024). *Indikator Kemiskinan 2021-2023*. <https://serangkota.bps.go.id/indicator/23/90/1/indikator-kemiskinan.html>

_____.(2024). *Indeks Keparahaan Kemiskinan di Kota Serang (Persen), 2021-2023*. <https://serangkota.bps.go.id/indicator/23/166/1/indeks-keparahan-kemiskinan-di-kota-serang.html>

_____.(2024). *Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Serang (Persen), 2021-2023*. <https://serangkota.bps.go.id/indicator/23/163/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-di-kota-serang.html>

_____.(2024). *Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunannya 2021-2023*.



<https://serangkota.bps.go.id/indicator/26/89/1/indeks-pembangunan-manusia-dan-komponen-penyusunannya.html>

_____. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023*.
<https://serangkota.bps.go.id/publication/2023/12/29/ea6c552db2c5d23f5ec30387/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-serang-2023.html>

_____. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023*.
<https://serangkota.bps.go.id/publication/2023/12/28/f2e950195b7c3bd102ce71b2/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-serang-2023.html>

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. (2022).
<https://penghubung.bantenprov.go.id/berita/berhasil-kendalikan-inflasi-pemprov-banten-raih-tambahan-insentif-rp-1037-miliar>

Pemerintah Daerah Kota Serang. (2023). *Evaluasi RPJPD Kota Serang Tahun 2008 – 2025*. Serang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

Radar Banten (2023). <https://www.radarbanten.co.id/2023/07/31/pemkot-serang-dapat-penghargaan-insentif-fiskal-dari-kemendagri/>

Republik Indonesia, (2019). *Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019* tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



_____, (2022). *Undang-Undang No 1 Tahun 2022* tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)

Tinjauan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pada RPJMD Perubahan 2018 – 2023, Serang: Pemerintah Daerah Kota Serang, 2023.

Wali Kota Serang Provinsi Banten, 2023. *Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026*. Serang: Pemerintah Kota Serang.

Wali Kota Serang Provinsi Banten, 2023. *Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040*. Serang: Pemerintah Kota Serang.





